



LAPORAN TAHUNAN 2014

**MEMPERKUAT
PERAN & POSISI PEREMPUAN
UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA
KEADILAN, DEMOKRASI & PERDAMAIAN**

2015

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK
KEADILAN DAN DEMOKRASI

LAPORAN TAHUNAN 2014

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Untuk Keadilan Dan Demokrasi

MEMPERKUAT

PERAN & POSISI PEREMPUAN

UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA

Keadilan, DEMOKRASI & PERDAMAIAN



PERIODE

JANUARI-DESEMBER 2014

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Jl. Siaga 1 No.2B, Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan -12510
Telp: (021) 79183221, 79183444, Fax : (021) 79183444
Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id
Website: www.koalisiperempuan.or.id

Pengantar

Tahun politik, yaitu tahun 2014, baru saja kita lalui. Pemimpin Nasional, Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, telah terpilih. Masyarakat, khususnya kaum perempuan, menanti penuh harap-harap cemas kiprah menciptakan perubahan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang terpilih. Sejumlah kebijakan dan tindakan telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin nasional, sebagian dari kebijakan dan tindakan tersebut menjadi tanda-tanda bahwa harapan menjadikan Indonesia yang lebih baik, memiliki peluang besar untuk terwujud. Namun sebagian kebijakan dan tindakan para pemimpin, membuat masyarakat pupus harapan.

Refleksi terhadap rangkaian peristiwa sepanjang tahun 2014 menjadi penting untuk dilakukan, sebagai pembelajaran politik kita. Beberapa peristiwa yang telah terjadi sepanjang awal tahun dan yang akan terjadi dalam satu tahun ke depan, perlu menjadi catatan sekaligus bahan pertimbangan dalam melakukan berbagai upaya untuk menjaga demokrasi, penegakkan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan kesejahteraan.

Jakarta, 4 April 2015

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

BAB 1

ANALISIS SITUASI

I. ANALISIS SITUASI NASIONAL

Setidaknya ada lima (5) peristiwa sepanjang tahun 2014 yang berpengaruh terhadap kehidupan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Yaitu : 1) Pemilihan Umum, Politik dan Demokrasi, 2) Legislasi Nasional 3) Penghapusan kemiskinan dan Perlindungan sosial, 4) Politik ekonomi, 5) Migrasi dan Perdagangan orang 6) Diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

1. Pemilihan Umum, Politik dan Demokrasi

Sepanjang tahun 2014, terjadi dua kali pemilihan umum, yaitu Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Presiden. Refleksi terhadap pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adalah adanya penguatan substansi dari sisi kebijakan dan penegakan terhadap pelanggaran kebijakan afirmasi. Dari sisi kebijakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon dan penempatan satu caleg perempuan diantara tiga nomor calon, menjadi kewajiban dan berakibat pada gugurnya Daftar Calon, apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Dari sisi hasil, kebijakan afirmasi terbukti mampu mendongkrak jumlah keterwakilan perempuan. Meskipun dalam pemilu kali ini baru berhasil pada DPRD di tingkat Kabupaten/kota. Dari 420 Kabupaten/kota terdapat 20 DPRD yang memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 30%, antara lain : di DPRD Kab. Minahasa yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi), DPRD Barito Selatan – Kalimantan Tengah 40% (10 dari 25 kursi) dan DPRD Depok – Jawa Barat 40% (20 dari 50 kursi), Kota Kendari – Sulawesi Tenggara 37% (13 diantara 35 kursi), Kota Madiun-Jawa Timur 33,3% (10 diantara 30 kursi), Kota Surabaya-Jawa Timur 34% (17 diantara 50 kursi). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah, khususnya Kabupaten/kota berhasil melampaui ambang batas minimal keterwakilan perempuan. Namun, kenyataan lain menunjukkan bahwa masih ada kabupaten yang tidak memiliki satu pun keterwakilan perempuan, seperti DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang 100% anggotanya laki-laki. Secara agregat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/kota mencapai 16,7% atau 2,408 perempuan dari total 14.410 kursi dari 403 kabupaten/kota yang tersedia datanya. Hal ini menunjukkan peningkatan yang tajam dibandingkan hasil pemilu 2009 yang hanya mencapai 12%.

Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi, hasil pemilu 2014, secara agregat tidak menunjukkan perubahan secara signifikan. Dari jumlah kursi 2.114 di 33 provinsi, terdapat 337 (15,94%) perempuan. Sedangkan anggota DPRD laki-laki mencapai 1.777 (84,4%). Sedangkan pada pemilu 2009 dari 2.005 kursi DPRD provinsi, terdapat perempuan 321 atau 16 % perempuan. Beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi secara signifikan, Seperti di Provinsi NTT, hasil pemilu 2009 hanya ada 3 perempuan, sedangkan hasil pemilu 2014 berhasil meloloskan 6 perempuan anggota DPRD dari total anggota 65 orang. DPR Aceh juga mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan. Pada Pemilu 2009 hanya ada 4 atau 5,7% perempuan dari total 69 kursi, meningkat pada hasil pemilu 2014 menjadi 12 (14,8%) perempuan dari total 81 kursi.

Sedangkan keterwakilan perempuan di DPR RI sebanyak 97 perempuan atau 17,32% dari 560 kursi. Dibanding pemilu 2009, mencapai 103 perempuan atau 18,3% perempuan dari 560 kursi pada pemilu 2014. Perubahan daerah pemilihan dan jumlah kursi di masing-masing DPRD turut berpengaruh pada keterwakilan perempuan. Perolehan kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2014, semula pada Pemilu 2009 sebanyak 38 kursi (28%), kemudian pada Pemilu Anggota DPD RI 2014 turun menjadi 35 kursi (26,51%).

Tantangan terbesar dari capaian hasil pemilihan legislatif 2014 ini adalah membuktikan bahwa peningkatan jumlah keterwakilan perempuan, berkorelasi langsung dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menyempitnya ketimpangan gender

Refleksi dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, adalah adanya peningkatan jumlah/prosentase perempuan yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan pemilih yang menargetkan khusus pada perempuan, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan masyarakat sipil, memberikan sumbangan pada peningkatan kesadaran perempuan untuk menggunakan hak politiknya. Pelajaran lain yang dapat dipetik dari Pilpres 2014 adalah bahwa Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 kontestan, melahirkan persaingan politik yang sangat tajam. Pembentukan Koalisi partai pendukung dari masing-masing calon, semakin mempertajam saingan dan menimbulkan pembelahan sosial, hingga tingkat kabupaten/kota. Dibutuhkan kerja keras untuk mempersatukan kembali masyarakat.

Dampak negatif pilpres berimbas pada beberapa keputusan politik dan legislasi nasional, yang menimbulkan kerugian pada perempuan. Penghapusan jaminan keterwakilan perempuan pada Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), berakibat pada sedikitnya jumlah perempuan yang duduk diposisi kepemimpinan alat kelengkapan dewan. Kerugian lain yang dialami perempuan adalah keputusan politik untuk penyelenggaraan pemilu Gubernur, Wali Kota dan Bupati melalui DPRD, keputusan ini merugikan kaum perempuan, karena pemilihan calon kepala daerah melalui DPRD berakibat tidak adanya persamaan kesempatan bagi semua orang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kelompok perempuan kehilangan kesempatan untuk mendorong perempuan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Proses dialog antara calon kepala daerah dengan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, yang akan dipimpin menjadi hilang. Semuanya itu adalah bukti nyata dari kerugian tersebut. Belum lagi ditambah dengan adanya dualisme dalam parlemen, yang mengakibatkan tidak efektifnya kerja DPR RI

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang diselenggarakan pada Juli 2014, memberi dampak positif dan negatif. Dampak negative muncul ketika calon presiden hanya ada dua pasang calon (presiden dan wakil presiden) yaitu, Pasangan calon Presiden Prabowo Subiyanto dan Wakil Presiden Hatta Rajasa, dengan calon Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, yang mengakibatkan kompetisi pemenangan pemilu presiden, sangat keras.

Pasangan calon Presiden Prabowo Subiyanto dan Wakil Presiden Hatta Rajasa, yang didukung oleh Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) . Sedangkan Partai Demokrat yang menyatakan tidak memihak pada salah satu koalisi dan menjadi partai penyeimbang, namun secara politik condong ke Koalisi Merah Putih.

Tajamnya persaingan antara koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, semakin menguat ketika masyarakat tanpa partai, yang diperhitungkan sebaai relawan dari masing-masing partai, membangun opini lewat berbaai media sosial

Partisipasi penuh masyarakat dalam mengawal perolehan suara, melalui pemantauan hasil penghitungan suara (scan C1) merupakan fenomena

baru dan satu-satunya terjadi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya yang cukup besar untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Terpilihnya Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, memberikan konsekuensi pada naiknya Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai Gubernur DKI. Situasi ini merupakan realitas sosial politik yang menarik. Yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup dewasa dalam memilih pemimpinnya, serta tidak diskriminatif terhadap perbedaan suku maupun ras.

Selain itu, penggunaan hak prerogatif presiden dalam menentukan pihak yang akan menduduki jabatan strategis, menuai pujian sekaligus kritik. Penempatan 8 menteri perempuan dalam Kabinet, yang diumumkan pada Oktober 2014, merupakan wujud dari komitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Kedelapan menteri perempuan tersebut adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Yohana Yambise), Menteri Sosial (Khofifah I Parawansa), Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup (Siti Nurbaya), Menteri Kesehatan (Nila F Moeloek), Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi), Menteri BUMN (Rini Soemarmo), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Puan Maharani) Namun pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri menuai kritik dari berbagai kalangan

II. ANALISIS SITUASI INTERNASIONAL

Sepanjang November 2014, terjadi tiga rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi membahas kerja sama dibidang Ekonomi dan Pembangunan, di tingkat regional dan internasional. Presiden Jokowi, yang baru saja dilantik sebagai kepala Negara dan pimpinan pemerintahan periode 2014-2019 akan menghadiri ketiga rangkaian peristiwa tersebut.

Ketiga rangkaian peristiwa tersebut adalah :

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang diselenggarakan pada 10-11 November 2014. Membahas 3 Agenda utama Yaitu: **_1. Meningkatkan integrasi perekonomian regional**, Para pimpinan negara anggota APEC diharapkan meluncurkan rancangan proses Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) dan mengambil langkah baru guna mencapai integrasi perekonomian regional. **2. Meningkatkan pengembangan inovatif, reformasi dan pertumbuhan ekonomi**, mengidentifikasi lima pilar kerjasama dan memangkas berbagai kendala demi pengembangan ekonomi Asia Pasifik. Pergeseran model pertumbuhan ekonomi,

restrukturisasi ekonomi, dan reformasi merupakan tugas utama para anggota negara APEC dan **3. Memperkuat pengembangan komprehensif di bidang infrastruktur dan konektivitas**

2. **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN** digelar di Naypyidaw, ibukota Myanmar mulai 12-13 November 2014. Selain 10 pemimpin negara-negara anggota, hadir pula dalam KTT ini perdana menteri India, Rusia, Cina, Australia, Jepang dan sekjen PBB. Agenda utama KTT Asean adalah kerjasama ekonomi menjelang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
3. **Pertemuan G20 (Brisbane, Australia)**, 15–16 November 2014, membahas tentang kerja sama ekonomi dan Pembangunan, termasuk dan tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi, investasi infrastruktur, perdagangan, tata kelola ekonomi global, Lembaga Keuangan Multinasional, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Ketiadaan Pangan, kesehatan, perubahan iklim, penanganan krisis energy.

Indonesia memang aktif di 3 forum tersebut. Namun kehadiran Indonesia di forum-forum tersebut, selama ini tak lebih dari fasilitator atas kepentingan global baik di regional maupun di dalam negeri. Kebijakan tersebut tak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia bahkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dan disetujui Indonesia mendatangkan kerentanan bagi rakyat Indonesia di semua sector.

Masyarakat sipil berharap agar pertemuan itu dianggap sebagai langkah awal mengimplementasikan politik luar negeri yang mengabdikan diri pada kepentingan nasional sekaligus memperkenalkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang mewujudkan cita-cita sebagai negara poros maritim.

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri atau Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy (ICFP) yang terdiri dari terdiri dari kumpulan LSM berbagai konsen, seperti INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant CARE, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia, Bina Desa, KPA, TII, YAPPIKA, IHCS, mengusulkan sebanyak 10 agenda untuk dibahas Presiden Joko Widodo untuk dibahas di forum internasional APEC, ASEAN dan G20, sebagai wujud diplomasi pro-rakyat yang dijanjikan Jokowi

Sepuluh (10) Agenda yang diusulkan oleh ICFP untuk Presiden Joko Widodo, adalah :

1. Melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Hingga saat ini buruh migran Indonesia masih diabaikan dalam diplomasi Indonesia bahkan dilupakan menjadi agenda yang harus diperjuangkan oleh Indonesia di

Forum APEC, ASEAN dan G20. Padahal jika dilihat dari struktur kontribusi pembiayaan pembangunan, remitansi buruh migran di kawasan Asia Pasifik (termasuk didalamnya kawasan ASEAN) melonjak secara signifikan. Namun demikian perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan buruh migran sangat diabaikan.

2. Memastikan perundingan perdagangan tidak merugikan masyarakat ekonomi kecil dan menengah seperti petani, buruh, perempuan, anak dan nelayan. Pemerintah tidak bisa serta merta membuka pasar di Indonesia tanpa terlebih dahulu memastikan masyarakat kecil mampu bersaing dengan pasar dengan kemampuan yang cukup. Saat ini, sebagian besar petani di Indonesia adalah petani pemilik lahan kurang dari 2 hektar dengan teknologi pertanian yang minim. Menjadi sulit ketika petani harus berhadapan dengan produk pertanian dari petani-petani di negara lain yang sudah memiliki teknologi tinggi
3. Memastikan investasi dapat memperkuat ekonomi nasional dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua dan memperkuat ekonomi nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan investasi sebesar 30%, namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,14 juta orang di tahun 2012. Jumlah angkatan kerja yang mampu diserap terus menurun, namun investasi terus meningkat. Ini menunjukkan investasi belum berhasil menciptakan lapangan kerja apalagi lapangan kerja yang layak bagi semua.
4. Memastikan kebijakan ekonomi seperti ekspor-impor dan investasi tidak merusak lingkungan hidup dan bukan bagian dari mata rantai suplai pemasok komoditi yang menggerakkan perbudakan modern terhadap anak, buruh dan perempuan. Data menunjukkan ekspor Indonesia 26,7 % bergantung pada komoditas bahan mentah khususnya produk perkebunan seperti sawit, mineral dan tambang yang kesemuanya ini merusak lingkungan. Beberapa produk komoditi ekspor Indonesia diolah dari organisasi produksi yang masih mempekerjakan anak, membayar upah buruh dibawah standar kelayakan serta tidak menghargai hak-hak perempuan.
5. Memastikan pemerintah Indonesia wajib mempertahankan komitmennya memberlakukan larangan ekspor untuk bahan mentah (raw material), sesuai UU Minerba No 4/2009. Kebijakan ini setidaknya sebagai upaya mempromosikan pengolahan domestik dan meningkatkan kapasitas perekonomian dari sisi penerimaan. Meskipun kebijakan ini selalu ditentang dalam fora internasional, namun pemerintah wajib mengedepankan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia

6. Memperkuat kerjasama perpajakan dalam rangka mencegah pelarian uang (illicit financial flow). Berdasarkan studi Global Financial Integrity (GFI, 2013), diperkirakan sebanyak US\$946,7 miliar di tahun 2011 aliran dana dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Total dana keluar dari 2002 hingga 2011 mencapai US\$5,9 trillion. Indonesia berada pada posisi tujuh dari 15 negara berkembang yang mengalami kerugian paling besar akibat praktek tersebut. Tercatat sebanyak US\$ 181,827 juta dana keluar dari Indonesia selama sepuluh tahun dari 2002 hingga 2011. Salah satu modus illicit financial flows adalah penghindaran pajak dan pelarian pajak
7. Mengurangi ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri terutama utang yang tidak menghormati HAM dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun rasio utang luar negeri Indonesia terus menurun, tidak berarti Indonesia leluasa membuka diri dengan utang-utang yang potensial melanggar HAM dan merusak lingkungan terutama utang-utang yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur.
8. Mendesak adanya kebijakan pendanaan iklim yang melindungi negara berkembang dengan mendorong program Adaptasi Iklim. Selama rejim SBY kebijakan REDD+ hanya menjawab problem negara maju yang dipimpin Amerika dimana mereka tidak mau meratifikasi protokol Kyoto. Jokowi haru berani menghentikan proyek konservasi yang hanya menjawab kebutuhan negara maju termasuk agenda blue carbon yang sedang digagas oleh negara maju dan dipaksakan untuk dijalankan kepada negara berkembang harus dihentikan karena tidak menjawab persoalan ancaman perubahan iklim di negara berkembang termasuk Indonesia. Komitmen SBY untuk menurunkan 26 % emisi harus dievaluasi dan diarahkan pada perubahan dan kesiapan rakyat beradaptasi terhadap iklim dengan memberikan subsidi terhadap jenis bibit yang tahan terhadap cuaca, pun demikian dengan masyarakat pesisir akibat naiknya permukaan laut, nelayan yang tidak mampu melaut karena ancaman gelombang tinggi.
9. Menolak kerjasama internasional dan investasi yang mengedepankan pengadaan tanah skala luas untuk pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan proyek infrastruktur yang mengakibatkan perampasan tanah-tanah masyarakat local (petani kecil, masyarakat adat dan nelayan). Investasi semacam ini bukan menciptakan lapangan kerja yang dijanjikan, namun mengeklusi masyarakat dari tanah dan lapangan kerja mereka. Investasi ini juga sangat jauh dari konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan.

10. Menjadi pendorong kekuatan kelompok-kelompok negara berkembang dan miskin untuk berhadapan dengan negara-negara maju dan korporasi multinasional terutama dalam perundingan perubahan iklim, perundingan perdagangan, juga perundingan lainnya. Selain itu juga mendorong adanya akuntabilitas di dalam semua perundingan internasional dengan melibatkan stakeholder dalam persiapan perundingan internasional termasuk transparansi dengan hasil-hasil perundingan. Akuntabilitas penting untuk dilaksanakan karena perundingan internasional berkaitan dengan kepentingan nasional dan kepentingan semua unsur negara termasuk masyarakat. Sehingga perlu adanya partisipasi multipihak dalam proses penyusunan agenda termasuk transparansi publik terhadap hasil-hasil perundingan tersebut.

III. ANALISIS INTERNAL ORGANISASI

Sampai dengan akhir 2013, Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia mengalami pertumbuhan struktur, sebagai berikut :

No	Anggota/struktur	2009	2010	2011	2012	2013
1	Anggota	27,803	27,803	31.760	35.307	37.605
2	Balai Perempuan	355	355	526	627	865
3	Cabang	89	89	96	104	113
4	Wilayah	14	14	14	14	14

Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia berhasil mengembangkan kesukarelawanan. Seluruh pengurus di tingkat Nasional-kecuali sekretaris Jenderal, pengurus wilayah, pengurus Cabang dan Pengurus Balai Perempuan bekerja berbasis kesukarelawanan, tanpa menerima Gaji.

Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, bekerja untuk melakukan kerja-kerja advokasi untuk reformasi kebijakan public, penguatan anggota dan organisasi, pengelolaan pengetahuan dan distribusi bahan informasi, komunikasi dan edukasi, serta tata kelola kelembagaan dan asset organisasi. Jumlah seluruh Staff Koalisi Perempuan Indonesia selama tahun 2014, sebanyak 21 orang Staff. Jumlah ini sangat tidak memadai dibandingkan dengan cakupan area kerja yang harus dikelola. Untuk itu Sekretariat Nasional telah melakukan recruitment staff untuk memenuhi kebutuhan penambahan sumber daya manusia.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN

I. Pelaksanaan Program

Program Koalisi Perempuan Indonesia bertema: **“Memperkuat Peran & Posisi Perempuan Untuk Mempercepat Terwujudnya Keadilan, Demokrasi & Perdamaian”** dilaksanakan oleh dua Kelompok kerja (Pokja) yaitu: **Pokja Reformasi Kebijakan Publik dan Pokja Penguatan Anggota dan Organisasi**, dan didukung oleh tiga divisi, yaitu Divisi Penelitian & Pengembangan, Sistem Manajemen Informasi & Teknologi Informasi (Divisi Litbang-SMI & IT), Divisi Keuangan, Divisi Kerumahtanggaan, Administrasi Umum & Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pokja Reformasi Kebijakan Publik (Pokja RKP) melaksanakan program dan kegiatan: kajian kebijakan, Lobby & Kampanye, tindakan hukum, dan kerja jaringan.

Sedangkan Pokja Penguatan Anggota & Organisasi melaksanakan program dan kegiatan: pemetaan kelompok kepentingan, pengorganisasian, meliputi : rekrutmen anggota, peningkatan kapasitas anggota dan kader, penambahan struktur organisasi, dan memastikan mekanisme demokrasi organisasi , meliputi Rapat Kerja, kongres wilayah, konferensi Cabang, Rembug Balai Perempuan.

II. Pelaksanaan Program & Kegiatan

II.1. Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik

Kajian kebijakan dilakukan terkait dengan peraturan dan undang-undang yang sedang dikawal oleh Koalisi Perempuan Indonesia.

II.1.1 Kajian Kebijakan

Beberapa kajian kebijakan yang dilakukan selama tahun 2014 adalah :

1. Kajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2014; Kajian terhadap peraturan ini dilakukan, untuk melihat peluang keterpilihan perempuan dalam Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kajian tentang Rancangan Undang-undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (RUU Pilkada), Kajian terhadap RUU Pilkada dilakukan untuk melihat jaminan hak warga Negara untuk memilih kepala daerahnya, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dan peluang untuk meningkatkan jumlah kepala daerah perempuan.
 3. Kajian terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kajian ini dilakukan untuk melihat dampak hukum terhadap pemberlakuan UU No 22 Tahun 2014 yang menetapkan pemilihan Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kajian ini termasuk menjadi dasar bagi Koalisi Perempuan Indonesia berserta jejaring kerja untuk mengajukan Permohonan Uji Materi di Mahkamah Kontitusi.
 4. Kajian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang membatalkan UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengubah pemilihan tidak langsung (melalui DPRD) menjadi Pemilihan Langsung oleh rakyat. Kajian dilakukan untuk melihat dampak dari PERPU terhadap Permohonan Uji Materi di Mahkamah Kontitusi, yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dan jejaring kerjanya.
 5. Kajian terhadap Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD, dan DPD, kajian ini dilakukan untuk mengajukan permohonan Uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi.
 6. Kajian terhadap UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kajian ini dilakukan untuk melihat peran perempuan dalam Pembangunan Desa.
 7. Kajian tentang Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). Kajian ini dilakukan untuk memberikan masukan terhadap RUU KKG kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 8. Kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 9. Kajian terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

II.1.2. Political Action: Seminar, Workshop, Lobby dalam bentuk hearing atau audiensi

1. **Lobby Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA)** untuk berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Pemerintah, dan regulasi peraturan pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk

memastikan agar perempuan memperoleh akses, partisipasi dan control berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

2. **Dengar Pendapat dengan DPRRI**, untuk menyampaikan usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dilakukan langsung oleh rakyat.

3. **Menyampaikan Petisi “Perempuan Mendukung PILKADA Langsung”**,

petisi disampaikan kepada Anggota Komisi III DPR RI, untuk disampaikan kepada pimpinan komisi DPRRI. Selain disampaikan kepada DPR RI, petisi “Perempuan Mendukung Pilkada Langsung “ juga dibagikan kepada media.



4. **Lobby kepada Bappenas** agar prioritas Perlindungan Sosial yang tidak saja diberikan pada kelompok rentan berbasis siklus hidup dan goncangan ekonomi, tetapi juga diberikan pada kelompok rentan karena system atau kemampuan produksinya, seperti nelayan, petani, sector informal, buruh migran dan anak buruh migrant, penyandang disabilitas dan penyandang masalah social.

5. **Seminar dan Workshop Ahli RUU KKG**

Kegiatan ditujukan untuk menyuarakan dan mendukung pengesahan RUU KKG dalam masa sidang DPR periode 2009-2014 sekaligus mengkonsolidasikan kelompok perempuan yang mendukung pengesahan RUU tersebut. Pada hari pertama seminar menghadirkan narasumber dari *stakeholder* seperti KemenegPP, Bappenas, Komnas Perempuan, Akademisi dan dari kelompok masyarakat sipil. Hari kedua lebih membahas langkah apa yang bisa dilakukan dalam sisa masa kerja DPR periode 2009 – 2014 yang hanya tinggal beberapa bulan, serta pembagian kerja di antara kelompok perempuan. Seminar ini didukung oleh Program IKAT US dan ICCO

6. **Workshop Pakar Konsep Perlindungan Sosial**

Kegiatan ini dilaksanakan pada 22-23 February di hotel Akmani, dengan menghadirkan beberapa pakar diantaranya; Bapak PM Laksono, Ibu Vivi Yulaswati dari BAPPENAS, Ibu Kusumastuti dari TNP2K, Bapak Juni Thamrin, dan Bapak Handoko dari REMDEC. Workshop menghasilkan beberapa konsep, dimana prinsip universal menjadi penting dalam program perlindungan sosial, dan perlindungan sosial juga sebaiknya menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil terutama gerakan perempuan. Workshop ini didukung oleh Program MAMPU – AUSAID

7. Workshop Finalisasi Konsep Perlindungan Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni di Hotel Amaris Juanda, yang dihadiri oleh staf setnas KPI, Presidium Nasional, dan perwakilan pengelola Program Wilayah Jawa Timur, Bengkulu, dan Jambi. Workshop ini menghasilkan draft konsep perlindungan sosial yang akan menjadi bahan usulan Koalisi Perempuan Indonesia pada pemerintah. Kegiatan ini didukung oleh Program MAMPU – AUSAID

8. Workshop Finalisasi Penelitian Perempuan dan Perlindungan Sosial

Workshop ini dilaksanakan di Hotel Amaris Bulan Juni 2014, dan workshop ini telah menghasilkan draft penelitian perempuan dan program perlindungan sosial yang akan menjadi advokasi. Kegiatan ini dihadiri oleh tim peneliti dari 3 propinsi, yaitu Jawa Timur, Bengkulu dan Jambi. Finalisasi tulisan penelitian didampingi secara langsung oleh bapak PM Laksono. Kegiatan ini didukung oleh Program MAMPU – AUSAID

9. Workshop Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kebencanaan

Workshop ini dilaksanakan pada 27-28 Mei 2014 di Hotel Pomelotel Jakarta, workshop yang dihadiri oleh perwakilan 17 pengurus dari wilayah dan cabang, presidium nasional dan staf sekretariat nasional, dilaksanakan untuk menghasilkan draft SOP Manajemen Kebencanaan mulai dari tingkat nasional sampai dengan Balai Perempuan. Mengingat waktu yang sangat singkat maka penyusunan draft dibantu oleh Bapak Lukman Hakim sebagai konsultan yang ditunjuk oleh KPI. Kegiatan ini secara pendanaan didukung oleh OXFAM GB. Saat ini draft SOP telah didiskusikan dalam 2 kali pertemuan pasca workshop dan akan mendapatkan masukan juga baik dari pengurus nasional dan kawan-kawan wilayah dan cabang.



10. Intervensi Rumah Transisi

Intervensi rumah transisi dilakukan dalam bentuk mendorong adanya Pokja Perempuan dan Anak dan intervensi membumikan Nawa Cita atau janji Jokowi JK.

Intervensi Rumah Transisi dilator belakang oleh situasi: bahwa ke 16 Pokja dalam Rumah Transisi tidak ada satupun pokja Perempuan dan Anak. Padahal isu Perempuan merupakan salah satu point penting dalam Nawa Cita (janji Jokowi-JK). Advokasi dilakukan melalui Indonesia Beragam. Koalisi Perempuan Indonesia bertugas menyusun draft Rekomendasi pembentukan Pokja Perempuan dan Anak. Hasil Advokasi, tidak ada penambahan Pokja tetapi nama dan tugas **Pokja Kemiskinan berubah menjadi Pokja Kemiskinan, Perempuan dan Anak.**

Intervensi Realisasi Nawa Cita dilakukan dengan mengusulkan program dan indicator untuk Mewujudkan Nawa Cita. (ada 11 butir janji dalam Nawa Cita)

Usulan Program dan Kegiatan meliputi: Program Quick win (100 hari kerja), Perubahan APBN 2015, Perencanaan Program Jangka Menengah dan Perencanaan Program Jangka Panjang.

Koalisi Perempuan Indonesia bertugas mengajukan usulan program untuk Janji :

1. Menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan
2. Menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan
3. Mengefektifkan pelaksanaan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan,
4. Memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak

11. **Seminar Nasional Perlindungan Sosial Inklusif, Adil Gender dan memberdayakan** , diselenggarakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, dengan narasumber : Kementerian Sosial, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH.DR.PH (Centre For Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia) dan Dian Kartikasari (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia)



12. Seminar tentang Kualitas Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial , dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, dengan Narasumber Danang Girindwardana (Ketua Ombudsman Republik Indonesia), Badan Pelayanan Jaminan Sosial



Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan moderator, Wiwiek Afiffah (Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur)

13. Diskusi Tematik Kedaulatan Pangan, tentang Peran Perempuan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, diselenggarakan pada 8 Desember 2014,

merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, dengan Narasumber : Rossana Dewi (Gitta Dewi) Prof. Dr. Moch Machfud (Pertanian UGM)

14. Diskusi Tematik Perempuan & Politik, tentang Keterwakilan Perempuan, diselenggarakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, dengan Narasumber Rieke Dyah Pitaloka (Anggota DPR RI), Sri Budi Eko Wardani (Puskapol UI), Dian Kartikasari (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), dengan moderator Irna Riza Yuliasuti (Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Bengkulu)

15. Diskusi Tematik tentang Perempuan & Bencana diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI), pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, menghadirkan Kelompok Perempuan Peduli Bencana, Badan Penanggulangan Nasional Bencana



16. Diskusi tematik tentang Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diselenggarakan bekerja sama dengan HUMA, pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, menghadirkan Chalid Muhammad.

17. Diskusi tematik tentang Hak Perempuan atas Pelayanan Publik, diselenggarakan bekerja sama dengan Yappika pada 8 Desember 2014,

merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, menghadirkan Franciska Fitri, Abdi Suryaninggati

18. Diskusi tematik tentang Undang-Undang Desa diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, menghadirkan narasumber : Yando Zakaria dan IRE

19. Diskusi tematik tentang Migrasi dan Perdagangan Manusia, diselenggarakan bekerjasama dengan Migrant CARE, dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, menghadirkan narasumber Anis Hidayah dan Wahyu Susilo



20. Diskusi tematik tentang Perempuan dan Seksualitas, diselenggarakan bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) wilayah Jogjakarta, dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional.



21. Diskusi tematik tentang Pekerja Rumah Tangga, diselenggarakan bekerjasama dengan Jaringan Advokasi Jala PRT, dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, menghadirkan narasumber Lita

22. Diskusi tematik tentang Perempuan dan Kesehatan, diselenggarakan bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional, menghadirkan narasumber Zumrotin

23. Diskusi tematik tentang Perempuan, Pendidikan dan Sains diselenggarakan bekerjasama dengan E-Net for Justice, dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional.



24. Diskusi tematik tentang Kekerasan Berbasis Gender diselenggarakan bekerjasama dengan Rifka Annisa dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional

25. Diskusi tematik tentang Perempuan dan Pelanggaran HAM Masa Lalu, diselenggarakan bekerjasama dengan (Kontras) dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional.

26. Diskusi tematik tentang Perempuan Konflik dan Perdamaian (Institut Titian Perdamaian) dilaksanakan pada 8 Desember 2014, merupakan bagian dari Rangkaian acara Kongres Nasional.

I. Perkembangan Advokasi Kebijakan di Tingkat Nasional

Memasuki tahun 2014 hampir semua kegiatan advokasi baik yang dilakukan KPI maupun lembaga lainnya difokuskan untuk mempersiapkan PEMILU, khususnya pemilihan legislative yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014. Aktivitas jelang PILEG dilakukan mulai dari memperkuat kawan-kawan perempuan yang maju sebagai calon legislative, juga mempersiapkan masyarakat khususnya kelompok perempuan agar mampu menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dan mengupayakan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam PEMILU tahun ini. Hal ini merupakan implementasi langsung dari isu keterwakilan Perempuan sebagai isu mainstream yang dimandatkan sejak KPI berdiri.

Persiapan PILEG juga berpengaruh pada proses-proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di parlemen. Anggota legislative perempuan yang kerap bersama-sama KPI melakukan berbagai advokasi di parlemen memilih untuk berkonsentrasi pada persiapan PILEG, karena hampir semua anggota legislative perempuan mencalonkan diri kembali, ini senada dengan catatan Perludem bahwa 95% aleg perempuan menjadi incumbent pada PEMILU 2014.

Walaupun hampir seluruh aktivitas di tingkat nasional dikonsentrasikan untuk mempersiapkan PEMILU, namun dalam setengah tahun ini Parlemen telah mengesahkan **12 Undang-Undang**¹ diantaranya; Undang-Undang Desa yang menjadi

¹ <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/undang-undang>

salah satu RUU yang dikawal oleh KPI sejak tahun 2012 yang disahkan pada 18 Desember 2013 dan salinan lembar sah negara dikeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lalu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Internasional Convention for The Suppression of Act of Nuclear Terrorism, dan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD, dan DPD yang disahkan sehari sebelum Pemilihan Presiden (PILPRES)

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang cukup menuai tekanan dari kelompok agama, dikarenakan PP ini terdapat pasal yang menetapkan aborsi dapat dilakukan bagi perempuan yang mengalami indikasi kesehatan khusus yang apabila kehamilan diteruskan berdampak pada resiko kematian, dan perempuan korban pemerkosaan. KPI dalam berbagai kesempatan juga memberikan opini terhadap pemberlakuan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan, bahwa tindakan aborsi yang ditetapkan dalam PP ini akan disertai dengan standard minimal yang menjadi dasar pertimbangan keputusan aborsi dilakukan, dan pentingnya pengawasan ketat bagi lembaga/institusi kesehatan yang melakukan tindakan aborsi secara illegal.

II. Posisi Kebijakan yang secara khusus dikawal oleh Koalisi Perempuan Indonesia

Beberapa Rancangan Undang-Undang yang menjadi menjadi focus advokasi Koalisi Perempuan Indonesia Mengalami beberapa perkembangan, baik dari segi substansi, proses penyusunan di parlemen antara lain:

1. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG)

Sudah 3 tahun sejak 2011 RUU ini diproses di parlemen, berbagai kendala masih menjadi penghambat RUU ini untuk disahkan, diawal memang RUU KKG masih menjadi kontroversi bahkan di kalangan gerakan perempuan, sebagian kelompok beranggapan bahwa RUU ini nantinya akan tumpang tindih dengan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 1984, dan berbagai konsep definisi yang muncul dalam proses pembahasan awal RUU ini, karena secara judul juga mengalami beberapa pergantian beberapa judul diantaranya adalah RUU Kesetaraan dan Keadilan Bagi Perempuan dan Laki-Laki, Lalu RUU Kesetaraan Gender dan akhirnya menjadi RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dan sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional sejak tahun 2012. Sejumlah kelompok juga masih resisten dengan RUU ini terutama kelompok Islam Fundamentalis yang beranggapan bahwa RUU ini akan mengarah pada liberalisasi sistem perkawinan di Indonesia, karena adanya praktik pernikahan sesama jenis, dan kekhawatiran bahwa RUU ini akan memberikan ruang bagi kaum perempuan agar berposisi melawan kaum lelaki.

Berbagai upaya konsolidasi gerakan perempuan dilakukan, KPI bersama dengan lembaga yang concern pada isu perempuan melakukan serangkaian aktivitas mulai dari membuat Daftar Inventaris Masalah dan draft RUU yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi Komisi VIII DPR RI untuk menyusun RUU ini, melakukan lobby, dan penguatan pemahaman kepada public tentang konsep gender yang selama ini sering mengalami distorsi di dalam masyarakat. Pada akhir Tahun 2013 Badan Legislasi telah menghasilkan draft awal RUU KKG, namun dalam beberapa analisa draft ini justru mengalami banyak perubahan meskipun dalam lobby dan Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) bersedia mengakomodir masukan serta beberapa konsep yang diajukan oleh kelompok perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia pun melakukan serangkaian sosialisasi RUU KKG di 3 wilayah, yaitu Ternate, Bali dan Manado dengan tujuan menggalang dukungan tentang pentingnya RUU KKG disahkan, di tingkat nasional juga dilakukan konsultasi public dan workshop untuk menyusun strategi agar RUU KKG dapat terus diproses di parlemen. Sampai dengan Maret 2014 parlemen masih menjamin bahwa RUU ini tidak akan berhenti diproses dan diupayakan disahkan di Tahun 2014. Tetapi keriuhan “ Pesta Demokrasi” pada akhirnya menenggelamkan RUU ini, bahkan menjelang PILEG salah seorang rekan Aleg perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan justru melayangkan statement yang mementahkan RUU KKG. Hal ini sangat disayangkan dan untuk mengembalikan animo public tentang RUU KKG, KPI mengeluarkan Pernyataan Sikap Organisasi untuk menanggapi statement rekan aleg perempuan tersebut.

Sampai dengan akhir 2014 RUU KKG belum dapat terdeteksi progress pembahasan RUU KKG terlebih lagi gelombang PILPRES yang cukup kuat sehingga hampir seluruh masyarakat fokus pada proses PILPRES yang cukup dinamis di tahun 2014 ini.

2. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Sejak September 2013 dalam RDPU dengan Badan Legislasi DPR RI, kelompok masyarakat sipil telah menyepakati bersama bahwa pembahasan RUU perlindungan TKI akan diajukan pada periode pemerintahan berikutnya 2014 -2019. Hal ini disebabkan bahwa sampai dengan 2013 Komisi IX yang memproses RUU ini mengalami banyak kendala, beberapa diantaranya adalah;

- persoalan PJTKI yang akan dihapuskan sama-sekali atau tetap diberlakukan tetapi melalui pengawasan ketat sehingga dalam kurun waktu tertentu peran PJTKI akan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah.
- Kelembagaan dalam hal ini, apakah BNP2TKI akan tetap diadakan atau fungsinya beralih kepada Komisi Perlindungan Buruh Migran. Meskipun usulan membentuk komisi juga diperhadapkan pada analisa dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara bahwa beberapa komisi yang ada di Indonesia kinerjanya kurang efektif .

- Dalam Amanat Presiden (AMPRES) RUU ini sebenarnya memandatkan 6 kementerian yang dikoordinatori langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memproses pembahasan RUU ini di tingkat pemerintah. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2013 belum ada selain dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan belum ada yang menyerahkan draft RUU untuk dibahas ditingkat BALEG,
- dan sejumlah substansi yang masih dipermasalahakan dalam draft RUU

3. Undang-Undang Desa

Setelah disahkan Undang-Undang Desa membuahakan sejumlah rekomendasi yang harus dikawal oleh masyarakat sipil, khususnya KPI sebagai organisasi masyarakat sipil yang strukturnya dibangun dari tingkat desa. Undang-Undang ini mengandung beberapa keistimewaan sekaligus juga merekomendasikan sejumlah mekanisme yang kuat agar UU Desa ini dapat diimplementasikan dengan baik.



a. Dana Milyaran Rupiah akan masuk ke Desa

Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".

b. Penghasilan Kepala Desa

Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

c. Kewenangan Kepala Desa

Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.

d. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah

Dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

e. Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aktivitas POKJA Reformasi Kebijakan Publik

A. Isu Keterwakilan Perempuan di ranah politik dan Publik

Koalisi Perempuan Indonesia, sejak Tahun 2012 disukung oleh USAID – Partnership Program IKAT US POWER dalam 6 bulan ini melakukan beberapa kegiatan, Sebagian kegiatan yang



terkait dengan isu keterwakilan perempuan juga didukung oleh Program MAMPU – AUSAID dan OXFAM GB

1. Finalisasi, Produksi dan Distribusi Modul Fasilitasi Pendidikan Pemilih

Modul ini merupakan pelengkap dari 2 modul sebelumnya yang diproduksi di bawah program IKAT-US: Modul Fasilitator **Pelatihan Ketrampilan Politik dan Manajemen Kampanye Bagi Perempuan Caleg**. Jika kedua modul pertama ditargetkan bagi perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif agar dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk peluang keterpilihan yang lebih besar, maka modul ketiga lebih ditargetkan untuk para pemilih (khususnya perempuan) agar dapat menjadi pemilih cerdas dengan memilih perempuan caleg yang tepat.

Sebelum digunakan oleh para fasilitator di komunitas, modul ini di-TOT-kan kepada para calon fasilitator. ToT pertama yang dilakukan di bawah program IKAT-US menyertakan peserta dari 3 wilayah area program: Aceh, Sumbar dan DKI. Sedangkan ToT lainnya yang dilakukan di bawah program MAMPU dibagi berdasarkan region berikut: Sumatera; Jawa 1 (DKI, Jabar, Jateng dan DIY); Jawa 2 (Jatim dan Kalimantan); Sulawesi; dan Sunda Kecil + Maluku Utara (Bali, NTB, NTT dan Maluku Utara). Setiap ToT diikuti oleh sedikitnya 20 orang peserta yang akan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih di Balai Perempuan.

2. Pendidikan Pemilih di Komunitas

Total terdapat kurang lebih 360-375 orang mengikuti kegiatan di 8 kabupaten / kota dalam area program IKAT di 3 provinsi Aceh, Sumbar dan DKI. Selain itu modul ini juga dipakai di seluruh wilayah (12 provinsi) dalam struktur KPI (rata-rata 5-9 BP dari setiap wilayah dengan peserta kurang lebih 30 orang di setiap BP).

3. Peningkatan Kapasitas untuk Perempuan Caleg Provinsi DKI angkatan II

Merupakan kelanjutan dari pelatihan serupa yang sudah diadakan sebelumnya di 3 area program IKAT (Aceh, Sumbar dan DKI) serta 1 pelatihan di Bandung, pelatihan ini diadakan untuk merespon permintaan dari para perempuan partai politik yang telah ikut dalam pelatihan pertama. Pelatihan kedua diikuti peserta dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PDIP, PKPI, PPP, PKS, Partai Golkar, and PKB.

4. Pencetakan dan Peluncuran Agenda Politik Perempuan

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya di mana KPI meluncurkan Agenda Politik Organisasi, pada pemilu 2014 KPI melakukannya secara bersama-sama dengan Gerakan INDONESIA BERAGAM dimana KPI merupakan salah satu inisiatornya. 10 agenda politik perempuan ini kemudian diluncurkan dengan menghadirkan perwakilan partai politik peserta pemilu sekaligus untuk menandatangani kontrak politik berisi 10 agenda tersebut. Kontrak politik

dihadiri antara lain oleh perwakilan dari partai politik: Partai Golkar, Partai Nasdem, PDIP, Partai Gerindra, PBB, PKB dan PKPI.

5. Finalisasi Laporan Penelitian Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Politik

Setelah tertunda cukup lama karena beberapa kali mengalami perubahan personel dalam tim peneliti dan melalui beberapa kali pertemuan tambahan untuk membantu tim penulis laporan, draft akhir laporan penelitian dikerjakan oleh Bu Titiek Kartika selaku editor / proofreader yang melakukan penyelarasan akhir terhadap draft dari para peneliti lapangan dan dari peneliti utama. Saat ini sedang dilakukan cek akhir terhadap draft akhir dan diharapkan dapat menjadi laporan penelitian utuh untuk kemudian digunakan sebagai alat lobi dalam bentuk kertas posisi untuk advokasi perubahan kebijakan rekrutmen dan kaderisasi perempuan di partai politik.

6. Penyusunan Daftar Perempuan Caleg Rekomendasi Organisasi

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan merupakan salah satu agenda utama KPI. Untuk itu, dalam pemilu 2014, kembali KPI menyusun daftar perempuan calon anggota legislatif yang berasal dari dalam organisasi maupun dari lembaga jejaring yang memiliki rekam jejak yang sesuai dengan visi misi KPI, maupun calon *incumbent* yang dalam penilaian organisasi telah cukup efektif bekerja sebagai wakil rakyat. Selain untuk dijadikan referensi bagi anggota maupun lembaga jejaring, daftar ini juga disusun untuk merespon kebutuhan kalangan media yang membutuhkan informasi mengenai perempuan caleg berkualitas.

7. Kajian Keterpilihan Perempuan Hasil Pemilu Legislatif 2014

Dari penetapan hasil pemilu legislatif untuk DPR RI, terdapat penurunan jumlah anggota legislatif perempuan dari sebelumnya sejumlah 103 (18%) menjadi 97 orang (17%). Meskipun terdapat tren peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di beberapa DPRD Provinsi maupun Kabupaten / Kota, perlu dilakukan kajian komprehensif untuk mengevaluasi proses pemilu yang lalu

B. Political Action: Seminar, Workshop, Lobby dalam bentuk hearing atau audiensi

C. Kampanye dan Publikasi

Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan kegiatan kampanye seperti; Talk Show Radio, Konferensi Pers, Pencetakan dan Publikasi produk terbitan organisasi.

1. Peluncuran Catatan Awal Tahun

CATAHU merupakan agenda tetap tahunan organisasi yang biasanya diluncurkan setiap awal tahun berjalan. Tahun 2014 CATAHU menyoroti tahun 2014 sebagai Tahun Politik dengan agenda PEMILU 2014 sebagai tonggak perubahan dalam perubahan kepemimpinan nasional yang harus direspon dan dimanfaatkan untuk tercapainya kesejahteraan, kemakmuran dan pemenuhan HAM.

2. Pencetakan dan Peluncuran Agenda Politik Perempuan

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya di mana KPI meluncurkan Agenda Politik Organisasi, pada pemilu 2014 KPI melakukannya secara bersama-sama dengan Gerakan INDONESIA BERAGAM dimana KPI merupakan salah satu inisiatornya. 10 agenda politik perempuan ini kemudian diluncurkan dengan menghadirkan perwakilan partai politik peserta pemilu sekaligus untuk menandatangani kontrak politik berisi 10 agenda tersebut. Kontrak politik dihadiri antara lain oleh perwakilan dari partai politik: Partai Golkar, Partai Nasdem, PDIP, Partai Gerindra, PBB, PKB dan PKPI.



3. Talkshow Radio mengenai Evaluasi Kinerja Parlemen periode 2009 – 2014

Dalam *talkshow* edisi ini, KPI menyoroti kinerja DPR periode 2009 – 2014 terkait peran dan fungsi legislasi mereka sehubungan dengan menjelang berakhirnya masa bakti, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan waktu persidangan yang tersisa untuk menghasilkan produk perundangan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu dalam *talkshow* dengan narasumber dari Komisi IV (Tety Kadi) dan pengamat parlemen dari PSHK, ada sejumlah catatan dari pengalaman dan pengamatan terhadap kinerja dewan selama ini serta bagaimana masukan untuk perbaikan dewan yang akan datang, khususnya dalam pembuatan kebijakan.

4. Talkshow Televisi tentang jelang PILEG dan kesiapan pemilih perempuan

Talkshow ini dilaksanakan 7 hari sebelum Pemilu Legislatif di hotel SAHID bekerja sama dengan Radio Kantor Berita 68 H, dengan menghadirkan beberapa narasumber; Bapak Ferry Riszkiyansyah KPU RI, Ibu Endang dari BAWASLU RI, Ibu Dian Kartikasari. Talkshow ini didukung oleh Program ICCO

5. Talkshow untuk publikasi Catatan Awal Tahun KPI,

Dilaksanakan pada 6 Februari 2014 bekerja sama juga dengan Radio Kantor Berita 68 H

6. Konferensi Pers mengenai Putusan MK terkait Uji Materi UU Pemilu No. 8 Tahun 2012

Setelah MK mengabulkan uji materi terhadap UU Pemilu No.8 Tahun 2012 khususnya yang mengatur mengenai dalam hal terdapat jumlah suara dan sebaran suara yang sama antara caleg perempuan dan laki-laki dalam suatu dapil maka kursi tersebut diberikan kepada caleg perempuan. Untuk merespon gugatan tersebut KPU telah membunyikannya dalam aturan PKPU sebelum putusan MK dikeluarkan.



7. Konferensi Pers Sosialisasi Rekomendasi Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Pada tahun 2014 ini Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan beberapa NGO di Jakarta mengirim laporan alternatif implementasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya kepada Komite EKOSOB di Genewa, Presidium Nasional KPI Damaria Pakpahan mewakili organisasi untuk mengikuti sidang di Genewa. Konferensi Pers ini dilaksanakan bersama dengan INFID, HRWG, dan beberapa lembaga lainnya untuk mensosialisasikan rekomendasi komite kepada Indonesia.

D. Proses Judicial Review

Judicial Review yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia yang terkait langsung dengan masa pelaporan ini adalah;

- 1. Judicial Review, Undang-Undang PEMILU** dimana Koalisi Perempuan Indonesia menjadi salah satu pemohon yang memperkarakan penjelasan pasal 56, dimana keterwakilan perempuan dalam penjelasan tidak memperkuat frasa wajib seperti yang termaktub dalam pasal 56, bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% wajib dipenuhi partai politik yang akan mengikuti PEMILU. Gugatan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum juga melakukan penguatan ini dalam peraturan KPU yang telah dilaksanakan dalam PEMILU Legislatif yang lalu.
- 2. Judicial Review, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,** Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan organisasi dan individu lainnya mengajukan diri sebagai pemohon untuk menggugat pasal tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang dimana Undang-Undang ini perlu menghapus ketentuan usia 16 tahun perkawinan pada perempuan, yang secara konstitusi merugikan kaum perempuan khususnya anak perempuan, karena

menurut Konvensi Anak yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia bahwa usia 0-18 tahun merupakan usia anak.

3. **Judicial Review Undang Undang Susunan Kedudukan DPRRI, DPRD dan DPD**, Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan lembaga dan beberapa tokoh masyarakat mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan dihilangkannya ketentuan kuota perempuan minimal 30 % dalam susunan komisi, fraksi, dan badan kerja di DPR.

E. Aktivitas Kerja Jaringan

Selama 2014 Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan kegiatan bersama dengan jaringan Perempuan, dan Pro Demokrasi, sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Workshop Perempuan Anggota Legislatif Terpilih – IKAT US

Workshop yang diadakan untuk menjawab kebutuhan lembaga-lembaga partner IKAT-US yang telah melaksanakan pemilu dan memiliki anggota parlemen terpilih yang baru, berisi materi-materi pelatihan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab anggota parlemen serta isu nasional apa yang menjadi prioritas di masing-masing dari 5 negara di mana partner berada (Indonesia, Malaysia, Phillipina, Cambodia dan Timor Leste). Selain itu diberikan juga materi untuk meningkatkan kemampuan anggota parlemen, terutama dalam beberapa bidang seperti:

Ketrampilan Analisis Legislasi dengan Perspektif Gender

Ketrampilan praktis yang penting bagi anggota legislatif perempuan, diantaranya:

- ✓ Media Relation Skills
- ✓ Public Speaking Skills
- ✓ Lobbying and Negotiation Skills
- ✓ Networking Skills
- ✓ Chairing Meeting Skills
- ✓ Constituency Outreach/ Skills

2. Partisipasi dalam *Women Leadership Forum To Women Parliamentarian II*

Merupakan kelanjutan dari forum serupa yang diadakan pada tahun sebelumnya, forum ini menghadirkan anggota-anggota parlemen perempuan dari 5 negara di mana program IKAT-US diimplementasikan. Selain ditujukan untuk ajang belajar bersama dan berbagi pengalaman antar anggota parlemen, dari forum diharapkan dapat terbangun suatu sinergi kerjasama antara perempuan parlemen di 5 negara dengan organisasi masyarakat sipil di negara-negara tersebut.

3. Penulisan Modul Integrasi Prinsip CEDAW dalam Konvensi Hak Disabilitas, dilakukan bersama dengan CWGI

Koalisi Perempuan Indonesia menjadi bagian dari Tim Penulisan Modul Pelatihan Hak Penyandang Disabilitas berbasis CEDAW dan Konvensi Penyandang Hak Disabilitas, yang diselenggarakan oleh CEDAW Working Group Initiative (CWGI). Modul ini diperuntukkan bagi masyarakat sipil maupun kelompok penyandang Disabilitas,

4. Pengembangan Modul Pemahaman dan Pemantauan CEDAW bagi aktivis perempuan di Papua, bersama dengan CWGI
5. Perancangan agenda Aksi bersama untuk mengkampanyekan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bersama dengan Jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)
6. Mengikuti workshop advokasi isu pembangunan dalam konteks G20, yang diselenggarakan oleh INFID
7. Penulisan Laporan CSO untuk Komite ECOSOC di Genewa, bersama dengan INFID, HRWG dan TURC
8. Mengikuti serial diskusi jelang PILPRES dengan KWI, wahid institute, ICRP, dan lainnya.
9. Mengikuti workshop intyegrasi prinsip HAM dalam pelaksanaan PEMILU PILG dan PILPRES dan agenda pemantauan pelaksanaan PILPRES, bersama dengan IMPARSIAL, KONTRAS, Forum ASIA, ANFREL dll.
10. Rapat Koordinasi CSO, untuk pengamanan PILPRES, YLBHI, IMPARsial, Kontras, Demos dll.
11. Konferensi Pers untuk merespon kontroversi hasil quick count PILPES yang berindikasi meresahkan masyarakat, dan berpotensi memicu konflik antar pendukung CAPRES, Konferensi Pers dilakukan sehari setelah PILPRES bersama dengan KONTRAS, IMPARSIAL, TURC, DEMOS, ICW, YAPPIKA, FREEDOM Institute, IGJ, Migrant Care, JPPR, KIPP, dan PERLUDEM
12. Konferensi Pers untuk merespon bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam PILPRES, seperti Kampanye Hitam, Kampanye Kebencian, dan Intimidasi kepada masyarakat, dilakukan bersama dengan IMPARSIAL, JPPR, KIPP, di Jakarta Media Center
13. Audiensi dengan MABES POLRI untuk mengajak Kepolisian agar dapat menjaga proses perhitungan suara oleh KPU mulai dari tingkat PPS – Kelurahan, PPK, Propinsi sampai dengan Nasional.

14. **Audiensi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyerukan agar KPK dapat berperan untuk melakukan pemeriksaan bagi capres-cawapres maupun pendukungnya yang melakukan politik uang dan bentuk-bentuk korupsi dalam proses PEMILU, audiensi ini diterima oleh 5 orang Komisioner KPK, dan dilakukan bersama dengan jaringan NGO; ICW, KOntras, Imparsial, IGJ, Migrant Care, KWI, danlainnya.**
15. **Menjadi inisiator Indonesia Beragam, melakukan deklarasi dan kampanye 10 Agenda Politik Perempuan dalam Rangka International Women Day, bersama jejaring di tingkat nasional dan KPI di wilayah.**

Jejaring & Advokasi Regional & Internasional

1. Kerjasama organisasi perempuan dari 5 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philipina, kamboja dan Timor Leste) untuk Peningkatan Keterwakilan Perempuan.
2. Keikutsertaan Koalisi Perempuan Indonesia dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Development Agenda Post 2015 (Indonesia CSO on Development Agenda Post 2015)
 - o Memperkuat isu gender dalam target dan indikator SDG
 - o Mengusulkan Perlindungan social sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan
3. Keikutsertaan Koalisi Perempuan Indonesia dalam Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri atau Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy (ICFP) yang terdiri dari terdiri dari kumpulan LSM berbagai konsen, seperti INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant CARE, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia, Bina Desa, KPA, TII, YAPPIKA, IHCS

III. POKJA PENGUATAN ORGANISASI

II.1 Pemetaan dan Penguatan Kelompok Kepentingan

Pemetaan isu kelompok kepentingan dilakukan dalam proses-proses organisasi berupa forum rembake, konfercab, kongres wilayah. Pada semester I tahun 2014 forum tersebut terjadi di Bengkulu, Sulawesi Tenggara – keduanya untuk kongres wilayah. Sementara konferensi cabang terjadi di kota Bima dan kabupaten Sumbawa Barat (NTB), Sumba Timur dan kota Kupang (NTT), Tarakan (Kalimantan Utara).

Secara umum situasi kelompok kepentingan yang sama dari daerah yang berbeda memang memiliki persoalan dasar yang sama. Hal tersebut terlihat dalam proses pemetaan isu kelompok kepentingan yang menjadi fokus pada semester ini sbb :

Kelompok Kepentingan	Isu	Dukungan yang dibutuhkan
Petani	Perlindungan kepada petani masih minim mulai dari kebijakan tentang harga komoditas hasil pertanian, ketersediaan dan harga bibit dan pupuk – termasuk pupuk organik pabrik, perlindungan sosial kepada petani dalam soal pertanian (ketika gagal tumbuh dan atau gagal panen), persoalan lahan yang semakin sempit, perebutan lahan petani dengan korporasi.	Sosialisasi dan Advokasi kebijakan terkait dengan implementasi UU Perlindungan Petani, pelatihan ketrampilan pertanian untuk penguatan kapasitas petani perempuan, pendidikan politik bagi petani perempuan.
Perempuan Pesisir dan Nelayan	Persoalan alam dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat pendapatan, KDRT, kesehatan reproduksi perempuan yang buruk akibat sanitasi yang tidak memadai, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tingkat pendapatan misalnya kelangkaan BBM khusus daerah pesisir dan nelayan, persoalan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi keamanan tempat tinggal, zonasi daerah laut yang kurang dipahami dan seringkali membuat nelayan melanggar daerah “terlarang”.	Sosialisasi dan advokasi tentang UU kelautan dan perikanan, UU (no 1 tahun 2014) tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, aturan mengenai zonasi kelautan, pendidikan politik untuk perempuan pesisir dan nelayan, pelatihan ketrampilan terkait pengembangan ekonomi alternatif bagi perempuan pesisir dan nelayan, advokasi terkait ketersediaan BBM khusus nelayan dan perlindungan sosial bagi nelayan.
Lajang, Janda dan Kepala Keluarga	Diskriminasi dan stigma negatif masih dialami oleh sebagian besar perempuan lajang (tidak menikah) dan janda, termasuk didalamnya untuk mengakses program perlindungan sosial pemerintah. Selain itu juga soal keamanan dari gangguan masyarakat umum karena perempuan tidak menikah – apalagi dalam usia dewasa dan janda dalam usia berapapun – kerap dianggap ancaman bagi rumah tangga orang atau perempuan yang gampang digoda atau diperlakukan semena-mena. Khusus pada daerah NTT, perempuan janda tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan hidup selanjutnya karena dia menjadi milik keluarga alm. Suami yang telah membayar belis.	Pendidikan politik untuk masyarakat mengenai hak-hak perempuan, advokasi kebijakan terkait hak perlindungan sosial dan hak atas pelayanan publik, pendidikan ketrampilan dan akses permodalan untuk penguatan ekonomi perempuan kelompok kepentingan ini.
Ibu Rumah Tangga	Kesehatan reproduksi, KDRT, kesempatan mengakses informasi	Pendidikan politik, sosialisasi dan advokasi kasus KDRT,

	dan pendidikan yang terbatas, ketergantungan ekonomi pada pasangan.	penguatan dan perluasan jaringan agar dapat mengakses informasi melalui berbagai media.
--	---	---

II. 2 Penguatan Struktur & Mekanisme Demokrasi Organisasi

a. Kongres Nasional

Diselenggarakan pada 8 -12 Desember 2014 di Pasar Semi Gabusan, Sleman Jogjakarta, dengan Thema Perempuan Mandiri, Perempuan Memimpin, diikuti oleh 1.300 orang , dari 917 Desa, 120 Kabupaten Kota, 25 Provinsi. Kongres



Nasional juga melibatkan 20 organisasi



jaringan yang menyelenggarakan berbagai event seperti Diskusi, seminar, Eorkshop dan pelatihan. Hasil Kongres Nasional adalah Agenda Kerja 2014-2019, Rekomendasi Politik dan terpilihnya pengurus Nasional

b. Kongres Wilayah :

i. Sulawesi Tenggara

Diselenggarakan pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Kendari dengan tema “Konsolidasi dan Penguatan Hak Politik Perempuan dalam Pemilu 2014 menuju Demokrasi Substansial”. Kongres wilayah II ini diawali dengan seminar tema tersebut dan menghadirkan narasumber Iwan Rompo, S.Sos, M.Si (KPU Prop. Sultra), Ir. Luki Paramita (Presnas Koalisi Perempuan Indonesia) dan Emmy Astuti, S.IP (Sekwil Sultra).

Tujuan yang ditetapkan dalam rangkaian seminar dan kongres wilayah II ini menghasilkan capaian : Adanya 15 caleg perempuan yang meningkat pemahamannya dalam menyusun strategi pemenangan pemilu legislatif 2014, Adanya

laporan pertanggungjawaban pengurus wilayah periode sebelumnya yang diterima oleh 133 peserta kongres, adanya rumusan isu strategis dan kebijakan umum organisasi dari beberapa kelompok kepentingan, terpilihnya pengurus



wilayah sultra periode 2014-2018, adanya komitmen 133 peserta kongres wilayah untuk saling berkoordinasi dan menjalankan fungsi organisasi.

Adapun pengurus wilayah terpilih adalah Megawati, SH sebagai sekretaris wilayah dan 10 presidium wilayah masing-masing kelompok kepentingan petani (Rosniwati), perempuan pesisir dan nelayan (Hasiani), ibu rumah tangga (Siti Huda), profesional (Gebby Marini), Pemuda Pelajar Mahasiswa (Anita Rahman), Pekerja Informal (Waode Habiba), Miskin Desa (Sri Kusuma Hastuti), Miskin Kota (Ismainar), Buruh Migran (Nurwati), Lajang Janda dan Kepala Keluarga (Hj. Marhasni).

ii. Bengkulu

Diselenggarakan pada tanggal 17-18 Mei 2014 dengan tema “Keterwakilan Perempuan untuk Hak Perlindungan Sosial Bagi Warga Negara”. Hari pertama dalam rangkaian kongres ini adalah dialog publik dengan tema tersebut yang menghadirkan narasumber caleg perempuan terpilih yaitu ibu Erna Sari Dewi, ibu Riri, ibu Susiana, dan Dian Kartikasari (Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia), perwakilan Bappeda Bengkulu dan BPPPA. Dialog ini menjadi forum masyarakat untuk menyampaikan masukan bagi caleg perempuan yang terpilih periode 2014-2019. Diharapkan mereka yang duduk sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan masyarakat – khususnya konstituen dapilnya – dan masyarakat secara umum.

Kongres wilayah itu sendiri berlangsung dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus wilayah periode 2010-2014, menetapkan isu

strategis dan garis besar haluan kerja organisasi serta pemilihan pengurus wilayah yang baru. Pengurus wilayah terpilih periode 2014-2018 adalah Irna Riza Yuliasuty sebagai sekretaris wilayah dan 6 presidium wilayah masing-masing dari kelompok kepentingan petani, pemuda pelajar mahasiswa, pekerja informal, ibu rumah tangga, profesional dan perempuan pesisir nelayan.



iii. Jambi

Diselenggarakan pada 26-27, Mei tahun 2014. Kongres diawali dengan seminar dengan Tema PERLINDUNGAN SOSIAL. Hasil –hasil Kongres Wilayah Jambi : 1) Adanya Laporan Pertanggung jaban Pengurus. 2) Adanya Program Kerja 2014-2018 dan ditetapkan Pengurus Wilayah Jambi, Koalisi Perempuan Indonesia untuk periode 2014-2018, sebagai hasil Pemilihan Pengurus dalam Kongres Wilayah ke III, yang diselenggarakan di Jambi pada tanggal 27 Mei 2014

Sdr. Ulfa Mahfudz sebagai Sekretaris wilayah Koalisi Perempuan Indonesia untuk wilayah Jambi . Presidium Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia untuk wilayah Jambi, yang merupakan perwakilan dari kelompok kepentingan, yaitu

1. Ibu Rumah Tangga : Ratna Dewi
2. Pekerja Informal : Anjaromani
3. Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa : Helfi Rahmawati
4. Lansia dan Jompo : Tundung Hastuti
5. Petani : Purwati
6. Profesional : Ir. Susi Rohati

iv. Sumatera Utara

Diselenggarakan pada tanggal 29 -30 November 2014, di Kota Jambi.

Kongres Wilayah diawali dengan Seminar dengan Thema : **“Strategi Perempuan Sumut Melaksanakan AFTA 2015”** Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa Sumatera Utara merupakan propinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai pintu gerbang masuknya berbagai produk termasuk tenaga terlatih dari negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Thailand maka perempuan Sumut khususnya harus segera menyusun strategi. Seminar diikuti oleh 70 perempuan.

Hasil-hasil Kongres dan Seminar :

1. Adanya 70 Peserta peserta Kongres Wilayah III KPI Wilayah Sumatera Utara memiliki pengetahuan tentang AFTA dan strategi menghadapinya.
2. Adanya Laporan perkembangan program KPI tahun 2009-2014 dari sekretariat Wilayah
3. Adanya Penetapan dan Pengesahan pertanggungjawaban Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah periode 2009 -2014
4. Adanya isu-isu strategis dan kebijakan umum sebagai program kerja kepengurusan Wilayah periode 2014 -2018
5. Adanya Penetapan dan Pengesahan Presidium Wilayah dan sekretaris Wilayah terpilih periode 2015 -2019, yaitu :

Juriani sebagai Sekretaris Wilayah dan 5 Presidium Wilayah :

No	Presidium Wilayah Kelompok Kepentingan (KK)	Nama	Asal
1	Perempuan Miskin Kota	Sumiati surbakti	Medan
2	Perempuan Pekerja Informal	Irawani	T.Tinggi
3	Perempuan Profesional	Rouli manurung	Dairi
4	Perempuan Petani	Mariana sitinjak	Dairi
5	Masyarakat Adat	Reni Banurea	Pakpak Bharat
6	Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa	-	-

c. Konferensi Cabang (Konfercab)

i. Konfercab I :

Konferensi cabang I kabupaten Sumba Timur – NTT dilaksanakan di aula kelurahan Matawai kecamatan kota Waingapu Sumba Timur NTT dibuka oleh bapak Sekda Sumba Timur mewakili Bupati yang berhalangan hadir. Konferensi cabang diawali dengan seminar setengah hari yang bertema “Memantapkan Langkah untuk Memperjuangkan Hak Perempuan Demi Terciptanya Kehidupan Setara, Adil dan Mandiri” dengan narasumber Dian Kartikasari (sekjend Koalisi Perempuan Indonesia), ketua KPUD Sumba Timur, Siti Suryani (Dosen STIE Kriswina Sumba Timur) dan dimoderatori oleh Pendeta Yuliana Ata Ambu – anggota Koalisi Perempuan Indonesia Sumba Timur. Seminar dan Konferensi diikuti oleh 201 peserta dari 10 balai perempuan yang berasal dari 11 kelompok kepentingan (anggota) ditambah dengan SKPD, pengurus partai politik, caleg laki-laki dan undangan dari lembaga lain yang ada di Sumba Timur. Peserta konferensi sendiri terdiri dari 116 orang dimana pada pemilihan pengurus cabang baru ada 8 kelompok kepentingan yang memenuhi persyaratan untuk memilih koordinatornya untuk duduk sebagai dewan kelompok kepentingan, sementara 3 kelompok kepentingan lain masih harus terus melakukan pengorganisasian dan perekrutan anggota untuk kemudian menyusul menambahkan anggota dewan kelompok kepentingan. Selang satu hari setelah konferensi cabang I dilaksanakan, pengurus cabang terpilih bersama pengurus balai perempuan melakukan rapat kerja cabang I yang difasilitasi oleh Dian Kartikasari – sekjend Koalisi Perempuan Indonesia bertempat di rumah sekretaris cabang terpilih. Rapat kerja ini menyepakati poin-poin penting yang menjadi program kerja cabang Sumba Timur periode 2014 – 2017.

Konferensi cabang I kota Kupang – NTT dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 di hotel Olive kota Kupang. Konferensi cabang ini dihadiri oleh 76 anggota dari 3 balai perempuan yang telah terbentuk di kota Kupang dan juga anggota-anggota yang tersebar di berbagai tempat namun belum memiliki balai perempuan. Konferensi cabang menghasilkan kesepakatan mengenai garis besar haluan kerja cabang kota Kupang, rekomendasi politik dan pengurus cabang terpilih dengan 4 dewan kelompok kepentingan. Pada tanggal 17 Juni 2014 dilanjutkan dengan rapat kerja cabang yang difasilitasi oleh Khomsanah – presidium nasional Koalisi Perempuan dan Welly Sanith Kono staff pokja Penguatan Organisasi sekretariat nasional. Rakercab I ini menghasilkan program kerja cabang periode 2014-2017 dimana salah satu rekomendasi penting yang harus dilakukan pada tahun 2014 adalah penguatan kapasitas anggota untuk pengorganisasian. Rekomendasi ini sejalan dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setnas sebelumnya pada perkembangan organisasi di Timor Barat.

Konferensi cabang I kabupaten Sumbawa Barat – NTB diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2014 diikuti oleh 9 balai perempuan. Hasil penting dari sidang-sidang komisi dalam konferensi cabang I KSB antara lain pentingnya

memperkenalkan Koalisi Perempuan Indonesia secara lebih luas kepada masyarakat KSB agar mendapatkan dukungan untuk gerakan yang dilakukan organisasi di KSB. Selain itu dalam rekomendasi politiknya, cabang KSB juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan termasuk di dalamnya program penyetaraan ijazah melalui kejar paket C (setara dengan SMU). Program ini dipandang penting bagi perempuan di KSB karena tingkat putus sekolah bagi perempuan di KSB masih tinggi, sementara peluang kerja yang ada banyak mensyaratkan ijazah sekolah minimal di tingkat SMU. Hal penting lain juga pada perjuangan keterwakilan politik perempuan dimana caleg juga bersyarat memiliki ijazah minimal SMU. Hasil dari pemilihan pengurus cabang KSB untuk periode 2014-2017 adalah terpilihnya 7 dewan kelompok kepentingan dan sekretaris cabang. Jumlah dewan kelompok kepentingan yang cukup banyak ini menunjukkan tingkat keragaman anggota Koalisi Perempuan Indonesia di KSB yang cukup tinggi. Artinya organisasi sebetulnya memiliki kekuatan dengan tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan yang berbeda tetapi di sisi lain juga penting diperhatikan manajemen organisasi untuk mengelola kelompok yang berbeda-beda tersebut. Program kerja yang diharapkan mampu menggerakkan organisasi dan bermanfaat besar bagi perempuan dan anak adalah gerakan istbath nikah dan pembuatan akta kelahiran secara massal yang akan segera dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia cabang KSB.

ii. Konfercab II dan III :

Konferensi Cabang II Kota Tarakan – Kalimantan Utara diselenggarakan pada 22 Maret 2014 di gedung serbaguna Pemkot Tarakan di kota Tarakan. Konferensi cabang dibuka oleh wakil walikota Tarakan bapak Khaeruddin Arief Hidayat yang dalam sambutannya beliau menyampaikan pesan agar perempuan di Tarakan memperkuat diri dengan banyak membaca, mencari dan menguasai informasi melalui berbagai media yang mudah diakses oleh perempuan.

Konfercab II yang dihadiri oleh Presidium Nasional (Fitriyanti) sebagai representasi pengurus nasional yang harus hadir di cabang-cabang yang belum ada pengurus wilayahnya merupakan ruang untuk refleksi dan laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Tarakan periode sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Tarakan diterima dengan catatan ybs diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis dan lengkap. Dalam pemilihan pengurus cabang periode 2014-2017 terpilih kembali Nur Asikin Thalib sebagai sekretaris cabang dan 5 orang dewan kelompok kepentingan masing-masing dari kelompok kepentingan profesional, ibu rumah tangga, perempuan pesisir dan nelayan, petani dan pemuda pelajar mahasiswa.

Konferensi cabang II kota Bima –NTB diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2014. Cabang Kota Bima semula merupakan bagian dari cabang Bima di NTB.

Kemudian dengan adanya pemekaran pemerintahan di Bima menjadi kota Bima dan kabupaten Bima maka Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan penyesuaian pemekaran cabang. Hal ini terkait erat dengan kerja advokasi kebijakan public yang akan berhubungan dengan struktur pemerintahan. Cabang kabupaten Bima telah terlebih dahulu melakukan konferensi cabang dalam periode kerjasama dengan Oxfam yang lalu. Kesepakatanannya waktu itu konferensi cabang kabupaten Bima disebut konferensi cabang I karena sebagian balai-balai perempuan yang berada di kabupaten Bima baru, pengurus cabang Bima berdomisili di kota Bima. Sementara untuk cabang kota Bima, konferensi cabang ini kemudian disebut konferensi cabang II sehingga salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah laporan pertanggungjawaban pengurus cabang periode terdahulu. Laporan pertanggungjawaban pengurus cabang diterima dengan cukup banyak catatan untuk perbaikan organisasi ke depan. Apalagi konferensi cabang ini memang terlambat cukup lama dari jadwal semestinya yang harus dilakukan 3 tahun sekali dan ketidakaktifan pengurus cabang untuk kerja-kerja organisasi di tingkat kota serta komunikasi dengan balai-balai perempuan. Setelah itu agenda berjalan dengan sidang komisi dan pemilihan pengurus cabang periode 2014-2017. Pengurus cabang terpilih adalah sekretaris cabang yang merupakan sekretaris cabang sebelumnya (incumbent) dengan 5 dewan kelompok kepentingan. Hasil-hasil penting dari sidang komisi dalam konfercab ini antara lain pentingnya cabang kota Bima memantau implementasi program BPJS, pengorganisasian anggota baik berbasis balai perempuan maupun kelompok kepentingan dengan menggunakan alat pengorganisasian antara lain penguatan ekonomi kelompok, melakukan sosialisasi dan audiensi kepada pemerintah setempat – termasuk pemerintah desa – untuk memperkenalkan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi yang legal di tempat tersebut. Rekomendasi penting lain adalah pengorganisasian kelompok kepentingan anak marjinal dan disable di kota Bima.

d. Rembug Balai Perempuan

Terselenggara rembug balai perempuan di beberapa tempat baik dengan support dana program-program khusus yang saat ini dikelola organisasi maupun dana mandiri yang digalang organisasi di daerah-daerah. Rembug balai perempuan semester I tahun 2014 menambah jumlah kekuatan organisasi, karena dengan terselenggaranya rembug balai perempuan berarti juga terjadi pengorganisasian, terjadi penambahan jumlah anggota baik berbasis desa/kelurahan maupun kelompok kepentingan. Arti penting lainnya adalah proses pengorganisasian yang dilalui di balai-balai perempuan membuat anggota dapat melihat/menemukan persoalan-persoalan bersama disekitarnya, menemukan solusi atas persoalan tersebut dan mengatasinya dengan kerja bersama. Dengan demikian diharapkan mereka akan terasah untuk membangun kerjasama dan mengatasi persoalan

bersama pada area persoalan yang lebih besar maupun cakupan wilayah yang luas juga.

Penambahan balai perempuan melalui rebug balai perempuan I dalam semester I tahun 2014 terjadi di :

- i. Bali dan Sulawesi Utara (dengan support program ICCO) : 7 BP
- ii. NTB dan NTT (dengan support program Oxfam) : 28 BP
- iii. Sulawesi Tengah (dengan support program DNP) : 17 BP

Selama tahun 2014 terjadi penambahan balai perempuan sebanyak 65 BP sehingga total seluruh Balai Perempuan Bertambah menjadi 930 Balai Perempuan.

1. Pendidikan dan Pelatihan

a. ToF Pelatihan Caleg

Training of Facilitator (ToF) Caleg diselenggarakan di dua region yaitu barat dan timur, dilakukan secara paralel pada tanggal 4-7 Januari 2014. Pemilihan penyelenggaraan secara paralel karena waktu penyelenggaraan pelatihan berkejaran dengan masa kampanye para caleg menjelang pemilihan umum bulan April 2014.

Pada pelaksanaan di wilayah-wilayah nantinya pelatihan caleg ini juga dirangkaikan dengan seminar mengenai perlindungan sosial dimana diharapkan caleg-caleg perempuan menyatakan komitmennya dalam penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan sosial sebagai hak warga negara. Oleh karena itu pada ToF Caleg ini juga dibahas materi perlindungan sosial dalam perspektif Koalisi Perempuan Indonesia.

Adapun pembagian area yang terlibat dalam ToF di wilayah Indonesia Barat dan Timur sebagai berikut :

i. Wilayah Indonesia Barat :

Diselenggarakan di Hotel Ibis Tamarin Jakarta dengan 25 peserta yang berasal dari Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Pontianak (Kalbar), Samarinda (Kaltim), Kukar (Kaltim) dan Tarakan (Kaltara). ToF ini difasilitasi oleh Damairia Pakpahan (Presidium Nasional) dan Sutriyatmi (Koordinator Pokja Penguatan Organisasi Setnas).



ii. Wilayah Indonesia Timur :

Diselenggarakan di Makassar dengan 25 peserta yang berasal dari Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sultra, Sulawesi Tengah, Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Tomohon. Fasilitator untuk wilayah Indonesia Timur adalah

Dian Kartikasari (Sekretaris Jendral) dan Rosniaty Aziz (Kader Wilayah Sulawesi Selatan).

b. ToF Pendidikan Pemilih

Training ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyiapkan kader-kader fasilitator yang siap memfasilitasi pendidikan pemilih di tingkat balai perempuan dan cabang. Mereka yang mengikuti ToF rata-rata adalah kader organisasi yang sudah terbiasa memfasilitasi pelatihan baik pelatihan yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia maupun lembaga jaringan dan ada beberapa kader yang belum pernah memfasilitasi pelatihan terstruktur namun sudah terbiasa memfasilitasi pertemuan-pertemuan dan menjadi moderator diskusi rutin organisasi.

ToF Pendidikan Pemilih dengan support program MAMPU diselenggarakan di 5 regio dengan pertimbangan agar jumlah kader yang mengikuti ToF semakin banyak dari setiap wilayah dan atau cabang. Dengan demikian diharapkan semakin



banyak juga kader yang meningkat kapasitasnya dalam hal menjadi fasilitator. Tujuan penting lain adalah memperluas informasi mengenai pentingnya pendidikan bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula dalam konteks demokrasi di Indonesia. Perluasan informasi ini penting agar pada proses-proses pemilihan dapat lahir pemimpin-pemimpin baru yang betul-betul mengerti rakyat, mampu menjalankan amanat yang dititipkan pemilihnya untuk kebaikan Indonesia, pemimpin yang mau mendengarkan dan menghargai.

Adapun pembagian regio untuk penyelenggaraan ToF Pendidikan Pemilih yang disupport program MAMPU sebagai berikut :

- i. Regio Sumatera : peserta berasal dari Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta sebanyak 20 orang. ToF diselenggarakan pada tanggal 1-4 Februari 2014 di hotel Bunga-bunga Jakarta dengan pertimbangan pengelolaan transportasi lebih mudah dan murah dibanding jika diselenggarakan di salah satu daerah di Sumatera. Peserta dari DKI Jakarta seharusnya mengikuti ToF di Regio Jawa I, namun karena ada kendala teknis maka bergabung di Jakarta. Fasilitator ToF Regio Sumatera adalah Sutriyatmi (Koordinator Pokja Penguatan Organisasi – Setnas) dan Dati Fatimah (Anggota Wilayah DIY – Direktur AKSARA Yogyakarta).
- ii. Regio Jawa I : peserta berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Tangerang kota (Banten) dan kabupaten Tangerang (Banten) sebanyak 26 orang. ToF diselenggarakan pada tanggal 1-4 Februari 2014 di Semarang (Jateng) dengan fasilitator Renny Frahesty (Kader wilayah DIY) dan Nourma Manalu (anggota wilayah Aceh).

- iii. Regio Jawa II : peserta berasal dari Jawa Timur, Pontianak (Kalbar), Samarinda, Kukar, Tarakan sebanyak 20 orang. ToF diselenggarakan pada tanggal 1-4 Februari 2014 di Surabaya. Fasilitator regio Jawa II adalah Wiwik Afifah (Sekwil Jawa Timur) dan Dian Aryani (Kader wilayah NTB).
- iv. Regio Sulawesi : Peserta berasal dari Sulawesi Selatan, Sultra, Sulteng, Manado, Minahasa, Minut, Minsel, Tomohon sebanyak 20 orang. ToF diselenggarakan pada tanggal 8-11 Februari 2014 di Makassar. ToF ini difasilitasi oleh Rosniaty Aziz (kader Sulawesi Selatan) dan Emmy Astuti (Kader Sulawesi Tenggara) dengan menghadirkan narasumber Mike Verawati Tangka (Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik – Setnas) yang menyampaikan materi tentang Perlindungan Sosial
- v. Regio Sunda Kecil : Peserta berasal dari Bali, NTB, NTT, Maluku Utara sebanyak 16 orang. ToF diselenggarakan pada tanggal 8-11 Februari 2014 di Hotel Puri Ndalem Sanur Bali dengan fasilitator Damairia Pakpahan (Presidium Nasional) dan Sutriyatmi (Koordinator Pokja Penguatan Organisasi Setnas).

Selain support program MAMPU, ToF Pendidikan Pemilih juga diselenggarakan dengan support program IKAT (Usaid). ToF ini diselenggarakan dengan **peserta gabungan dari 3 area program IKAT (Usaid) yaitu Aceh, Sumatera Barat dan DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 13 orang.**

Total peserta ToF Pendidikan Pemilih sebanyak 113 orang.

c. Pendidikan Pemilih

Pendidikan Pemilih yang dimaksud adalah pendidikan bagi pemilih dalam pemilu legislatif 2014 agar menjadi pemilih yang kritis pada kampanye yang dilakukan partai politik peserta pemilu dan atau calon anggota legislatif. Pendidikan pemilih menjadi salah satu cara Koalisi Perempuan Indonesia dalam kerangka mewujudkan keterwakilan politik perempuan. Karena dalam pendidikan ini peserta akan diajak berdiskusi mengenai pentingnya perempuan duduk dalam lembaga public, sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan public. Tentu yang penting juga adalah mengingatkan para pemilih tentang pentingnya mengawal anggota legislative perempuan terpilih agar tetap konsisten dalam memperjuangkan nasib perempuan, nasib rakyat terpinggir, tidak melakukan korupsi dan hal-hal yang melanggar sumpahnya sebagai wakil rakyat.

Pendidikan Pemilih kali ini menggunakan modul yang dimiliki Koalisi Perempuan Indonesia yang sudah direvisi terutama update aturan pemilu dan partai politik. Revisi modul dilakukan dengan dukungan Program IKAT (Usaid). Tahap berikutnya adalah mempersiapkan fasilitator pendidikan pemilih melalui training of facilitator. Training ini diselenggarakan dengan support program MAMPU (Ausaid) yang dikelola Koalisi Perempuan Indonesia sebagaimana telah dilaporkan pada point di atas.

Secara jumlah (kuantitatif) peserta pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia sebagai berikut :

- i. Pendidikan Pemilih dengan support program IKAT (Usaid) sebanyak 210 orang dari 7 balai perempuan di Aceh, Sumatera Barat dan DKI Jakarta.

- ii. Pendidikan Pemilih dengan support program MAMPU (Ausaid) **sebanyak 3.240** orang dari 108 balai perempuan di Aceh, Sumbar, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Sultra, Sulteng.
- iii. Pendidikan pemilih dengan support program Oxfam sebanyak 1.409 dari 46 balai perempuan di NTB dan NTT.

Total peserta pendidikan pemilih sebanyak 4. 859 orang.

Capaian secara kualitatif dari pendidikan pemilih antara lain :

- i. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia memahami pentingnya keterwakilan politik perempuan, mengenali cara melakukan pencoblosan dalam pileg 2014, memahami pentingnya melakukan pengawalan suara caleg perempuan.
- ii. terlibatnya laki-laki sebagai peserta dalam pendidikan pemilih di NTT. Keterlibatan laki-laki atas dasar kebutuhan yang sama akan informasi mengenai pemilu legislative 2014 ini tentunya hal yang membanggakan bagi organisasi. Apalagi mereka yang terlibat di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Flores Timur dengan kultur patriarkhi yang masih sangat kental. Dalam proses juga mereka terlibat aktif dalam diskusi, bersikap menghargai dan menghormati pendapat peserta perempuan dan memberikan masukan-masukan positif bagi organisasi.
- iii. terselenggaranya pendidikan pemilih di beberapa tempat secara mandiri oleh masyarakat namun mengundang Koalisi Perempuan Indonesia sebagai fasilitator dan atau narasumber. Pendidikan tersebut memang berbeda dengan modul karena lebih berfokus pada bagaimana cara memilih/mencoblos, sosialisasi bentuk surat suara dalam pemilu legislative 2014. Pelatihan mandiri ini terselenggara di cabang Pontianak (Kalbar), kabupaten Tangerang (Banten), Sumba Tengah (NTT) – tambahan, Sumba Barat Daya (NTT) – tambahan. Sayangnya secara jumlah berapa peserta yang mengikuti tidak ada dokumen yang dimiliki organisasi. Di Sumba Barat Daya forum tersebut menggunakan pertemuan posyandu sebanyak 2 kali, di Sumba Tengah bersamaan dengan pertemuan yang diselenggarakan kepala desa sebanyak 2 kali, di Pontianak (Kalbar) diselenggarakan bersama lembaga jaringan dan forum untuk kampanye calon DPD RI yang merupakan kader Koalisi Perempuan Indonesia (Hairiah) dan di kabupaten Tangerang diselenggarakan bersama dengan pengajian rutin.

Temuan dalam pendidikan pemilih sebagai berikut :

- Tingginya angka buta huruf di perdesaan khususnya dialami oleh perempuan. ada beberapa peserta laki-laki yang mengalami juga (Sumba Tengah) namun karena keterlibatan mereka tidak banyak maka angka yang ditemukan juga kecil.
- Pemilih tidak mengenal warna dengan baik sementara dalam pemilu legislative 2014 kartu suara dibedakan dalam 4 warna sebagai penanda yaitu hijau adalah surat suara yang berisi parpol dan nama caleg DPRD kabupaten/kota, biru adalah surat suara yang berisi parpol dan nama caleg DPRD provinsi, kuning adalah

surat suara yang berisi parpol dan nama caleg DPR RI dan merah adalah surat suara yang berisi nama dan foto calon anggota DPD RI propinsi masing-masing.

- Calon pemilih menyatakan kesulitan dengan surat suara yang tidak memuat gambar/foto calon anggota legislative karena rata-rata mereka tidak hafal dengan nama lengkap calon dan beberapa juga tidak hafal dengan lambang partai politik dimana caleg yang akan dipilih bernaung.
- Kesulitan pemilih lain adalah besarnya lembar surat suara yang harus dibuka, dicoblos lalu dilipat kembali sebanyak 4 lembar tersebut.
- Pemilih yang merupakan penyandang disabilitas netra (tuna netra) tidak disediakan surat suara dengan huruf Braille melainkan dipersilahkan mencoblos dengan didampingi oleh petugas dan atau orang yang dipilih sendiri. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran pada kejujuran dan netralitas pendamping.

Berdasarkan temuan tersebut Koalisi Perempuan Indonesia **merekomendasikan** kepada pihak terkait untuk menjawab tantangan-tantangan sebagai berikut :

- Dalam masa kampanye pemilu legislative 2014 para caleg perempuan harus lebih intensif turun ke daerah pemilihannya (dapil), mendekati konstituen dan calon pemilih. Selain mensosialisasikan visi, misi dan programnya mereka juga harus mensosialisasikan diri dalam surat suara berada di kertas warna apa, nomor urut berapa, partai politiknya bergambar apa dan nomor urut atau posisi partai politiknya dalam surat suara di sebelah mana.

Cara ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemilih terutama yang buta huruf, tidak mengenal warna, lansia dan disable untuk memastikan mereka tidak akan salah mencoblos nama caleg yang dipilih.

- Dalam kerja organisasi selanjutnya Koalisi Perempuan Indonesia harus melakukan pemberantasan masalah keaksaraan sebagai salah satu alat pengorganisasian untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan selanjutnya mendorong perempuan melakukan advokasi hak atas pendidikan dan hak atas informasi bagi perempuan.
- Dalam kerja organisasi selanjutnya penting untuk melakukan upaya perluasan pendidikan politik untuk perempuan dan masyarakat secara umum dan lebih intensif menjalin kerjasama dengan para pihak yang melakukan kerja-kerja serupa dan atau mereka yang sesungguhnya berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

d. Seminar dan Lokakarya bagi Calon Anggota Legislatif Perempuan

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterwakilan politik perempuan yang dilakukan melalui seminar. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas calon anggota legislatif perempuan acara seminar dirangkai dengan lokakarya caleg perempuan. Harapannya apa yang telah disampaikan narasumber dan atau calon pemilih yang hadir sebagai peserta seminar, dapat diolah caleg perempuan sebagai bahan kampanye dan hal-hal yang harus diperjuangkan khususnya jika nanti menjadi anggota legislatif.

Semiloka caleg perempuan yang dilakukan pada semester I tahun 2014 didukung oleh program MAMPU. Salah satu isu penting yang diangkat dalam semiloka ini adalah hak warga negara atas perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam rangkaian semiloka ini juga para caleg didorong untuk berani menandatangani kontrak politik dengan calon pemilih melalui Koalisi Perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya perempuan dan anak.

Semiloka caleg perempuan diselenggarakan di 12 area program MAMPU yaitu :

- i. Aceh pada tanggal 14-15 Maret dengan peserta seminar 68 orang dan lokakarya 37 caleg perempuan.
- ii. Sumatera Barat tanggal 21-22 Januari dengan peserta seminar 75 orang dan lokakarya 37 caleg perempuan.
- iii. Bengkulu tanggal 31 Januari dengan peserta seminar 68 orang dan lokakarya diikuti oleh 25 caleg perempuan tingkat provinsi.
- iv. Jambi tanggal 14-15 Februari dengan peserta seminar 68 orang dan lokakarya diikuti oleh 41 caleg perempuan.
- v. DKI Jakarta menyelenggarakan lokakarya tanggal 1-2 April dengan peserta 21 orang.
- vi. Jawa Barat menyelenggarakan pada tanggal 19-20 Februari dengan peserta 30 caleg perempuan.
- vii. Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari – 1 Februari dengan peserta 30 orang
- viii. Jawa Timur menyelenggarakan pada tanggal 22-24 Januari dengan peserta seminar sebanyak 217 orang dan lokakarya sebanyak 52 caleg perempuan.
- ix. Sulawesi Tenggara menyelenggarakan lokakarya tanggal 26-27 Februari dengan peserta 28 caleg perempuan
- x. Sulawesi Selatan pada tanggal 24-26 Januari dengan peserta seminar 60 orang dan lokakarya 30 caleg perempuan.
- xi. Sulawesi Tengah pada tanggal 29-30 Januari dengan peserta 40 orang.
- xii. Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada tanggal 1-3 Februari dengan jumlah peserta 30 orang.

Total peserta semiloka caleg perempuan dari 12 wilayah sebanyak 360 orang.

e. Pendidikan Kader Dasar

Pendidikan Kader Dasar sebagai salah satu strategi dalam menjaga organisasi melalui pengkaderan. Pendidikan ini diselenggarakan di tingkat balai perempuan dan atau kelompok kepentingan dengan harapan anggota yang mengikuti pendidikan kader adalah mereka yang betul-betul mengenali dan mengalami berbagai persoalan secara langsung dan kemudian dapat menjadi penggerak organisasi.

Pendidikan kader dasar (PKD) pada semester I tahun 2014 diselenggarakan di

- i. Balai perempuan Fatululi-Oesapa cabang Kota Kupang NTT pada tanggal 8-11 Juni 2014 dengan support dana program Oxfam. PKD ini difasilitasi oleh Nafidatul Himma (kader wilayah Jawa Timur). Persoalan kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan yang berdampak multibeban yang harus

ditanggung oleh perempuan dan sampah yang mengganggu di lingkungan kota Kupang menjadi temuan penting dalam PKD. Selain itu juga balai perempuan yang berada di daerah pesisir ini mengalami abrasi yang menggerus tanah kampung dan mengancam tempat tinggal. Abrasi terjadi akibat dari rusaknya lingkungan/pohon-pohon bakau di daerah tersebut. Oleh karena itu mama-mama anggota BP Oesapa sudah lama melakukan pendekatan ke dinas kelautan untuk penanaman kembali pohon bakau yang akan mereka rawat sebagai benteng kampung. Upaya ini berhasil di tahun lalu dan tanaman bakau sudah mulai tumbuh dengan baik. Kemudian setelah PKD selesai mereka juga melanjutkan dengan pelatihan daur ulang sampah berupa kain perca (sisa jahit) untuk dijadikan bros, pengikat rambut dll. Pelatihan ini masih difasilitasi oleh Nafidatul Himma. Anggota di Oesapa merasa ketrampilan tersebut sangat bermanfaat karena hasilnya dapat dijual langsung untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengurangi sampah di kota Kupang.

- ii. Wilayah Sulawesi Tenggara dilakukan dengan support dana DNP di :
1. Cabang Kota Baubau dilakukan di kelurahan Sulaa tanggal 16-19 Januari dengan 30 peserta ; kelurahan Kampeonaho tanggal 20-23 Januari dengan 30 peserta ; kelurahan Kadolomo tanggal 27-30 Januari dengan 30 peserta. Pelatihan ini difasilitasi oleh Imelda Laugi (Staff sekwil Sultra) dan Waode Yani Haerani (Pengurus Cabang Kota Baubau).
 2. Cabang Buton dilakukan di BP Winning tanggal 16-19 Januari diikuti oleh 29 peserta ; BP Kabawakole tanggal 20-23 Januari diikuti 26 peserta ; BP Kancinaa tanggal 24-27 Januari diikuti 29 peserta. PKD ini difasilitasi oleh Rachmawati Andi Baso (Staff Wilayah Sultra) dan Hamsinah La Jura (Pengurus cabang Buton).
 3. Cabang Konawe dilakukan di BP Asao tanggal 25-28 Februari diikuti tanggal 31 peserta ; BP Asolu tanggal 20-23 Februari diikuti 25 peserta ; BP Asinua tanggal 27-30 Februari diikuti oleh 30 peserta. PKD difasilitasi oleh Hasnawati (Preswil Sultra) dan Norma Rahim (Sekcab Konawe).
 4. Cabang Kolaka dilakukan di BP Sabilambo tanggal 10-13 Januari diikuti 30 peserta ; BP Sembilan Belas November tanggal 14-17 Januari diikuti 30 peserta ; Campuran peserta dari BP Watuliandu, BP Lakookato, BO Laloeha sejumlah 30 peserta. PKD difasilitasi oleh Merlin Yanti Galuh dan Christien (Staff setwil Sultra).

Total peserta PKD di wilayah Sultra tersebut di atas : 356 orang

f. Pelatihan CO

Pengorganisasian masyarakat - dalam hal ini kelompok perempuan – menjadi pilihan strategi Koalisi Perempuan Indonesia untuk membangun masyarakat sipil yang solid dan mampu menjadi kelompok pengusul dan penekan kebijakan. Strategi ini dipilih karena diyakini bahwa kelompok perempuan yang berdaya akan

mampu menyuarakan kepentingannya, membela hak-haknya dan hak masyarakat secara umum. Selain itu juga pengorganisasian akan membangun dan mengembangkan kapasitas kader-kader perempuan sesuai dengan potensi masing-masing.

Sebagai organisasi berbasis keanggotaan perempuan, pengorganisasian yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia menghadapi tantangan antara lain mobilitas kader (CO) yang terbatas waktu dan kewilayahannya. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti perempuan memiliki beban kerja domestik, termasuk pengasuhan anak-anak yang dilekatkan lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki. Selain itu juga bagi perempuan terutama mereka yang sudah berumah tangga dan memiliki anak, mayoritas mengalami kesulitan jika harus mengorganisir jauh dari kampungnya karena kekhawatiran soal keamanan jika jauh dari keluarga dan di tempat yang dianggap asing untuk kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan jauh berbeda jika perempuan pergi/tinggal jauh dari rumah/keluarga untuk bekerja seperti menjadi buruh migran, PRT ke kota dll.

Oleh karena itu organisasi menyiapkan kader-kader yang mampu mengorganisir masyarakat terutama di tempat tinggal/lingkungan hidupnya dan atau sekitar kampung tinggalnya. Dengan tidak menutup kemungkinan dari proses ini juga lahir kader-kader yang dapat menjadi penggerak di wilayah lain yang jauh dari asalnya. Penyiapan kader-kader ini dilakukan melalui pelatihan CO dengan menggunakan modul pelatihan yang juga dikembangkan dalam semester I tahun 2014. Pelatihan dengan support program MAMPU dilakukan di 7 wilayah yaitu :

- i. Aceh ; dilakukan di Banda Aceh pada tanggal 20-28 Mei dengan peserta dari Aceh dan Sumatera Utara sebanyak 19 orang.
- ii. Sumatera Barat ; dilakukan di kota Padang pada tanggal 2-8 Juni dengan 27 peserta dari Sumatera Barat. Sebetulnya pelatihan di Sumbar ini mengundang peserta dari cabang Palembang (Sumsel) namun tidak hadir.
- iii. DKI Jakarta dan Banten ; dilakukan di Serang (Banten) pada tanggal 16-22 Juni dengan peserta dari DKI Jakarta, cabang Kota Tangerang dan cabang Kabupaten Tangerang sebanyak 25 orang. Sebetulnya pelatihan di sini mengundang peserta dari cabang Bandar Lampung yang sudah menyatakan kesediaan hadir pada proses persiapan namun membatalkan kehadirannya 1-2 hari sebelum hari H dengan berbagai alasan.
- iv. Jawa Barat ; dilakukan di Bandung pada tanggal 8-13 Juni dengan peserta sebanyak 32 orang yang berasal dari cabang-cabang di Jawa Barat. Selain itu juga menghadirkan peserta 2 orang focalpoint Bogor dan 1 orang focalpoint Tasikmalaya.
- v. Jawa Tengah ; dilakukan di Semarang pada tanggal 2-8 Juni dengan peserta sebanyak 29 orang yang berasal dari Jawa Tengah dan DIY.
- vi. Sulawesi Tenggara ; dilakukan di Kendari pada tanggal 19-26 Mei dengan peserta sebanyak 25 orang yang berasal dari Sulawesi Tenggara.
- vii. Sulawesi Tengah ; dilakukan di Palu pada tanggal 20-26 Mei dengan peserta sebanyak 28 orang yang berasal dari Sulawesi Tengah dan cabang Mamuju (Sulbar).

Total peserta pelatihan CO pada semester I tahun 2014 sebanyak 185 orang.

g. Penyusunan Modul Pengorganisasian

Modul pelatihan pengorganisasian dikembangkan dari kurikulum pelatihan yang sama. Kurikulum tersebut disusun oleh pokja Penguatan Organisasi dengan mengundang beberapa narasumber yang berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat pada tahun 2010. Setelah itu kurikulum tersebut digunakan untuk pegangan workshop CO yang direkrut setnas dari berbagai wilayah dan cabang dan dideploy ke berbagai wilayah dan cabang sesuai kesepakatan dalam rakernas pada 2010 dan 2011.

Kemudian pelatihan CO yang dilakukan di NTT dan NTB tahun 2011 (support program Oxfam), pelatihan CO di NTT, NTB, Sulsel, Sultra pada tahun 2012 (support program Access Phase II), pelatihan CO di Bengkulu, Jambi dan Jatim (support program MAMPU tahap persiapan) juga menggunakan kurikulum sebagai pegangan fasilitator dalam pelatihan.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman di atas maka kurikulum yang ada saat ini telah dikembangkan menjadi modul pelatihan. Workshop ini difasilitasi oleh Wiladi Budiharga dari SCN-Crest. Tim penyusun modul selain staff di pokja PO juga menghadirkan Indry Oktaviani (anggota Cabang Depok yang berpengalaman memfasilitasi workshop CO setnas bersama Wiladi Budiharga dan memfasilitasi pelatihan CO di Jambi. Selain itu juga terbiasa memfasilitasi pelatihan dan pelatihan untuk fasilitator diberbagai tempat), Ari Ujianto (mantan co-coordinator jaringan rakyat miskin kota Indonesia yang telah berpengalaman melakukan pengorganisasian dan atau memfasilitasi pelatihan-pelatihan pengorganisasian dan sedang menyusun buku pengalaman pengorganisasian jaringan rakyat miskin kota), Nanang Hari S (aktivis bina desa dan saat ini beraktivitas di KRKP, memiliki pengalaman mengorganisir sangat lama terutama pada kelompok-kelompok petani dan perdesaan).

Catatan penting dari pengembangan modul ini adalah penambahan jam untuk praktek lapangan pada materi analisis sosial dan analisis gender, selain juga pada materi pengorganisasian itu sendiri. Penambahan jam praktek ini berdasarkan pengalaman pelatihan sebelumnya dimana praktek dilakukan 1 kali untuk materi pengorganisasian atau bahkan tidak ada praktek sama sekali sepanjang pelatihan dengan asumsi peserta langsung praktek selama 3 bulan. Kelemahan dari praktek langsung tersebut adalah jika monitoring dan pertemuan CO yang mengikuti pelatihan tidak dilakukan secara intensif maka kekurangan dan atau kebutuhan-kebutuhan selama pelatihan tidak dapat langsung didiskusikan dan tidak langsung ada klarifikasi-klarifikasi. Dengan penambahan jam praktek ini pelatihan pengorganisasian kelas diperkirakan membutuhkan waktu pelatihan efektif 7 hari. Selain penambahan jam praktek tersebut, dalam modul yang dikembangkan juga menambahkan materi analisis lingkungan sebagai bagian dari membangun perspektif kader dalam melihat persoalan lingkungan dan dampaknya pada perempuan. Pengembangan penting lain adalah proses pelatihan luar kelas setelah pelatihan kelas 7 hari ini selama 6 bulan. Dalam proses tersebut idealnya peserta

pelatihan CO mendapatkan penambahan materi-materi terkait untuk menambah wawasan, mengasah ketrampilan kader, melakukan klarifikasi-klarifikasi antara materi 7 hari dengan praktek di lapangan. Idealnya praktek ini diasistensi oleh fasilitator yang melatih selama 7 hari dan atau pengurus wilayah atau kader setempat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pengorganisasian.

2. Administrasi

Secara manajemen bagian ini merupakan bagian baru di pokja Penguatan Organisasi. Namun dari sisi kerja, selama ini semua aktivitas dan pengelolaan administrasi pokja penguatan organisasi telah dilakukan di bagian masing-masing. Staff khusus untuk mengelola administrasi pokja mulai bekerja pada 1 Juli 2014.

Capaian dalam pengelolaan administrasi pokja penguatan organisasi dalam periode januari – juni 2014 sebagai berikut :

- a. SK pengurus terpilih yang diterbitkan pengurus nasional dan telah dikirimkan ke pengurus yang bersangkutan : pengurus wilayah Sulawesi Tenggara, pengurus wilayah Bengkulu, pengurus cabang kutai kartanegara, pengurus cabang tarakan, pengurus cabang kota tangerang, pengurus cabang sumba timur, pengurus cabang kota kupang.
- b. Data peserta pelatihan-pelatihan berdasarkan nama, alamat, jenis pelatihan dan jumlah peserta terekam berdasarkan daftar hadir yangn dilampirkan panitia dalam laporan keuangan.

III.1. DIVISI PENGUATAN KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL DEVELOPMENT)

A. Legalitas Lembaga

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pelayanan Rutin yaitu pemberian dan atau Pengiriman Copy dokumen untuk kepentingan pendaftaran Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Wilayah dan cabang pada pemerintah Daerah (Kesbanglinmas), pengiriman data dalam satu bendel berupa Akte Pendirian Koalisi Perempuan Indonesia sejak berdiri sampai dengan Perubahannya (dari Sekjen I sampai dengan Sekjen ke III (Dian kartikasari, SH) dan Perubahannya, Surat Keterangan Terdaftar pada Departemen Dalam Negeri (KESBANGLINMAS), NPWP . dan Surat Keterangan Domisili Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2014
2. **Perubahan Struktur Organisasi**
Perubahan Struktur Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia **Surat Keputusan No. 02 /SK-KPINas/struktur/2010 dinyatakan tidak berlaku** digantikan dengan **No. 19 /SK-KPINas/Struktur/2013 yang ditanda tangani 2 September 2013 sebagai berikut :**

2.1. Kelompok Kerja

1. Pokja Program Reformasi Kebijakan Publik

- a. Bidang Kajian Kebijakan Publik
- b. Bidang perubahan Kebijakan Publik
- c. Bidang Monev-Implementasi kebijakan
- d. Staff Pendukung

2. Pokja Program Penguatan Organisasi

- a. Bidang Penguatan Struktur Organisasi
- b. Bidang Penguatan Kelompok Kepentingan
- c. Bidang Pendidikan Untuk Anggota
- d. Staff Kantor Penghubung
- e. Staff Pendukung

2.2. Divisi

1. Divisi Mobilisasi Sumber Daya dan Kebencanaan

- a. Bidang Hubungan Internal
- b. Bidang Hubungan Eksternal
- c. Bidang Kesiapsiagaan dan Respon Bencana
- d. Bidang Monitoring dan Advokasi

2. Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) , Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

- a. Bidang Penelitian dan Peningkatan Kapasitas
- b. Bidang Monitoring dan Evaluasi
- c. Bidang Dokumentasi Informasi dan Publikasi
- d. Bidang Database dan Manajemen Informasi (berbasis Teknologi)
- e. Bidang Teknologi

3. Divisi Keuangan

- a. Koordinator Keuangan
- b. Perencanaan Keuangan
- c. Pembukuan / Bookeeper
- d. Chasier
- e. Asisten Keuangan

4. Divisi Kerumahtangaan, Kepersonaliaan dan Administrasi Umum

- a. Kepersonaliaan & Dokumen Legal Organisasi
- b. Administrasi Umum
- c. Kerumahtangaan

5. Divisi Penggalangan Dana

- a. Hubungan Eksternal
- b. Hubungan Internal
- c. Produksi dan Pemasaran

B. Manajemen Internal Sekretariat Nasional

1. Manajemen sistem internal sekretariat Nasional ini dilakukan untuk memberikan panduan kerja bagi pengambilan keputusan di tingkat sekretariat, penilaian kinerja dengan form yang sudah kita miliki.
2. Perbaikan tata kelola kelembagaan telah mencapai hasil, bahkan adanya perubahan Struktur Organisasi ini menunjukkan ada perkembangan program yang dibutuhkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Perubahan struktur tersebut sudah ada staff sebagai assiten untuk Program keterwakilan Perempuan juga staff Penelitian (Lihat Lampiran Perubahan Struktur Organisasi)

C. SURAT KEPUTUSAN/KEBIJAKAN SEKJEN

Surat keputusan /kebijakan Sekertaris Jenderal dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan penting terkait dengan tata kelola organisasi, sehingga perlu SK sebagai penguat kebijakan yang diambil/diputuskan oleh Sekjen sebagai langkah yang bijaksana agar tidak terjadi miss atau kesalahpahaman dan sebagai pelengkap administrasi pendukung untuk Funding jika diperlukan.

D. Kerumahtanggaan

Tugas-tugas Kerumahtanggaan dilakukan untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh kerja-kerja program maupun non program sebagai supporting system serta memastikan keamanan dan kebersihan kantor .

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Expedisi surat/pengiriman dokumen organisasi
2. Melakukan pemantauan dan perawatan peralatan organisasi
3. Pengecekan ulang dan pencatatan Inventarisasi Asset (barang Bergerak), sarana dan prasarana kantor minimal 3 bulan sekali.
4. Pemenuhan kebutuhan dapur dan perawatan peralatan dapur
5. Menjaga Kebersihan dan Keamanan Kantor
6. Perpanjangan rumah kontrakan KPI sampai dengan Maret 2016
7. Sudah memperoleh tempat untuk Kongres yaitu di Yogyakarta tetapi masih perlu pemantapan.
8. Menyiapkan Ruang Rapat beserta kelengkapannya

Capaian :

1. Semua surat dan atau dokumen terkirim sesuai tujuan.
2. Terpeliharanya peralatan Organisasi Tercatatnya Asset KPI untuk IT dan non IT
3. Diketahui jumlah Asset KPI bertambah atau berkurang karena kerusakan
4. Terpenuhinya kebutuhan Rumah tangga sehari-hari
5. Kantor bersih dan Aman
6. Masih tetap menggunakan rumah kontrakan lama.
7. Di Yogyakarta
8. Tersedianya Ruang rapat

E. Administrasi Umum – Layanan Komunikasi

Administrasi umum dilakukan dalam bentuk :

1. Penerimaan telepon masuk dari jejaring kerja, dan dari KPI seluruh Indonesia
2. Pengadministrasian Surat Masuk dan keluar
3. Pendistribusian disposisi undangan Jejaring kerja
4. Pendokumentasian /notulensi rapat-rapat internal
5. Pengelolaan daftar hadir staff
6. Pencatatan dan informasi mobilitas/Agenda staff & sekretaris jenderal
7. Penyusunan data alamat, e-mail, telepon dan atau faximile jejaring kerja dan perubahannya.
8. Penyusunan data alamat Kantor , e-mail, telepon dan atau faximile Sekretariat Wilayah dan cabang dan perubahannya
9. Penyusunan data alamat , e-mail, telepon dan atau faximile media dan perubahannya

Capaian :

1. Lancarnya komunikasi dengan KPI seluruh Indonesia dan Jejaring kerja
2. Teradmindkannya Surat masuk dan Keluar per 01 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014 : Surat Keluar : 95 eksp Surat masuk (Non Fax) dan fax : 40 eksp.
3. Sampainya disposisi undangan jejaring kerja
4. Terdokumentasikannya notulensi rapat
5. Teradmindnya Kehadiran Staff
6. Tercatatnya semua informasi mobilitas / Agenda staff dan Sekjen
7. Ter-updatenya data alamat jejaring kerja terbaru
8. Ter-update data alamat Kantor Sekretariat Wilayah dan cabang terbaru
9. Tersusunnya data alamat media terbaru

F. Kepersonaliaan

Dilakukan dalam bentuk :

1. Rekrutment Staff Koalisi Perempuan
 - a. Sdr. Tarsa dari pekerja Kerumahtanggaan pindah / mutasi ke SMI – TI sudah lulus D3 BSI dan pindah ke program melalui test teori dan praktek dan memenuhi kualifikasi dan menjalani proses pembelajaran selama 1 (satu) tahun.
 - b. Perekrutan untuk pekerja kerumahtanggaan sdr. Tarsa digantikan oleh sdr. Aditya Rahman.
 - c. Pada Tahap Pertama ada 9 orang Pelamar, PO, RKP dan FO. Diterima 1 staff untuk Litbang Sdri. Diyah Wara, SMI-TI untuk Penulisan Semai sdri. Hidayatut Thoyyibah, Front Office sdri. Meidina. Staff Keuangan pengganti sdri. Ririn Ridiarti yaitu sdri. Emi Kartika
 - d. Dalam proses sebagai Front Office Sdri. Meidina diperbantukan di Pokja PO atas permintaan Koordinator Pokja PO sebagai Admin pada POKJA PO dan dalam proses pembelajaran. Untuk itu dilakukan perekrutan untuk FO.

2. Tahap kedua ada 4 orang Pelamar, diterima 3 orang untuk Pokja RKP 1 orang yaitu Sdri. Manna Maria Nababan, Sdri. Stephana WB direkrut untuk Pokja PO dan 1 orang FO sdri. Syarah Nabila Tuharea.
3. Kualifikasinya yang menjadi persyaratan dalam perekrutan ini berlaku umum tidak dibeda-bedakan untuk penerimaan pelamar anggota KPI maupun bukan anggota KPI (prioritas untuk Anggota). Koalisi Perempuan sudah memiliki standard persyaratan terlampir. Prioritas untuk Anggota Koalisi Perempuan Indonesia baru untuk peminat lainnya.

4. Administrasi penggunaan Hak Cuti staff day off dan lain-lain

Capaian :

1. Tercatatnya dokumen kepersonaliaan dan proses rekrutmen
2. Day off, Hak Cuti tahunan maupun cuti masa kerja 5 tahun diberlakukan dan tercatat baik ter update

G. Staff Koalisi Perempuan Indonesia per tanggal 31 Juli 2014 Juli selain Sekjen

1. *Aditya Rachman*
2. *Ariyanto*
3. *Bayu Sustiwi*
4. *Dewi Komalasari,*
5. *Diyah Wara*
6. *Dyah Bintarini*
7. *Emi Kartika*
8. *Farida Indriani*
9. *Hidayatut Thoyyibah*
10. *Lia Anggiasih,*
11. *Liessya Emizora*
12. *Linarti,*
13. *M. Nurul Huda*
14. *Manna Nababan*
15. *Meidina*
16. *Rakhmat Hidayat*
17. *Sabriyah Soleman*
18. *Sutriyatmi,*
19. *Syarah Nabila Tuharea*
20. *Tarsa Wiria*
21. *Welly Stephana*
22. *Yuseva Sinuraya*

Catatan : Sdri. Mike Verawati Tanka Resign mulai tanggal 31 Juli 2014

H. PME

I. Perencanaan Monitoring & Evaluasi

Memastikan terselenggaranya pertemuan untuk Perencanaan Kerja , Monitoring dan Evaluasi antara lain :

1. Penyediaan fasilitas ruangan untuk penyusunan draft Work plan (persiapan untuk rapat Kerja nasional setiap tahun).
2. Penyediaan fasilitas untuk koodinasi Pokja dan Divisi untuk rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan kerja
3. Penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan monitoring dan Evaluasi akhir tahun periode 6 bulanan (Januari 2014 s/d 30 Juni 2014)

Capaian

1. Tersedianya fasilitas ruangan untuk penyusunan draft Work plan (persiapan untuk rapat Kerja nasional)
2. Tersedianya fasilitas untuk koordinasi Pokja dan Divisi untuk rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan kerja
3. Tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Semester satu periode 6 bulanan (Januari – Juni 2014)

J. Audit Keuangan

Audit Keuangan dilakukan oleh Divisi Keuangan periode 2013 dalam proses.

Capaian

Siap membantu proses Audit Keuangan

K. Rapat-rapat

Rapat –rapat diselenggarakan dalam bentuk :

1. Rapat Koordinasi seluruh Staff
2. Rapat Koordinasi Pokja/Divisi
3. Rapat teknis Pelaksanaan kegiatan
4. Rapat dengan jejaring kerja
5. Rapat Persiapan Kongres CO

Untuk kepentingan rapat-rapat tersebut Divisi kerumahtanggaan mengatur penggunaan ruang, penyediaan peralatan dan konsumsi (kalau dibutuhkan).

Capaian :

Terselenggaranya rapat-rapat tersebut di atas dengan baik dan fasilitas yang ada

L. Keperpustakaan

1. Dilakukan dalam bentuk penyediaan data base keperpustakaan
2. Perpustakaan KPI sampai saat ini belum efektif sebagai perpustakaan untuk publik karena masih belum tersedia sumber daya untuk membantu pengelolaan perpustakaan
3. belum tersedianya ruang dan sarana membaca.
4. Penambahan koleksi Perpustakaan tercatat 4665
5. Mengurus ISBN dan Barkode nya di Perpustakaan Nasional

Capaian :

1. Tersedianya data buku keperpustakaan
2. Diketuainya jumlah Koleksi Perpustakaan
3. Menyetorkan kepada fundraising penginapan KPI kontribusi jaringan perempuan.
4. Buku terbitan Koalisi Perempuan ber ISBN

M. Fundraising

1. Penjualan Produk KPI dan penjualan Produk Pihak ke III (**menghabiskan stok lama**)
2. **Menyewakan Rumah KPI pada Staff, sebesar Rp. 300.00,-/bulan plus biaya listrik.**

Capaian : ,

1. hasil penjualan Koran bekas,
2. Tidak / belum menemukan planning event Fundraising
3. Tersewakannya Rumah KPI pada Staff

III. 2 Divisi Penelitian dan Pengembangan , TI dan SMI

III. 2. 1 Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

1. Penelitian dalam Program MAMPU

Workshop peneliti perempuan dalam program perlindungan sosial pada tanggal 7-11 Februari 2014 di Wisma Hijau, Cimanggis. Hasil yang dicapai adalah adanya kesamaan persepsi, jadwal dan prosedur penelitian yang secara rinci termuat dalam rancangan penelitian aksi yang dilakukan oleh tiga wilayah yakni Jambi, Bengkulu dan Jawa Timur.

Kegiatan coaching/mentor dilakukan di Bengkulu pada 12-15 April 2014, di Jambi pada 28-30 April 2014 dan di Jawa Timur (Surabaya) pada 4-8 Mei 2014. Sebuah catatan yang menarik dari para informan, dari Bengkulu ada kelompok kepentingan informal dan petani dan nelayan yang selalu bermigrasi untuk berjuang mempertahankan hidupnya. Jambi menampilkan hal yang mirip dengan fokus pada eks transmigrasi yang berada sejak lama di pulau Sumatra sedang Jawa Timur lebih pas mengekspos keberadaan kelompok kepentingan buruh migran yang terus berjuang untuk impian mereka. Setiap wilayah akan menampilkan profil informan mereka pada ekspos nasional yang direncanakan akan berlangsung pada 18 Juni 2014 di Jakarta.

Lokakarya hasil penelitian dilakukan di Museum Nasional Jakarta pada 18 Mei 2014. Lokakarya ini menampilkan tiga narasumber yaitu ibu Wiwik Afifah. SH, MH

(Koordinator Peneliti Wilayah Jawa Timur), ibu Irna Riza Yuliasuty. S.Sos (Koordinator Peneliti Wilayah Bengkulu), dan ibu Ratna Dewi (Tim Peneliti Wilayah Jambi). Sedangkan reviewer pada lokakarya yaitu Ibu Dr. Vivi Yulaswati (Bappenas) dan Bapak Dr. A. Toni Prasetyantoko (Unika Atmajaya Jakarta).

Penulisan penelitian diadakan di Jakarta pada Juni 2014 dan dihadiri 20 orang yakni tim peneliti, pengelola program MAMPU dan nara sumber Prof Dr. Laksono. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan menghasilkan laporan penelitian final dari masing-masing wilayah serta catatan riwayat hidup para informan.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monev program MAMPU untuk wilayah Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara (mei 2014) dibarengi dengan pergantian pengurus wilayah sehingga umumnya pengurus wilayah yang lama telah melakukan pertanggungjawaban secara terbuka dan diterima oleh peserta kongres. Monev di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat (mei 2014) dilakukan oleh pengurus wilayah masing-masing.

Monev program ICCO Maluku Utara dilakukan pada Juni dengan mengunjungi semua BP di Ternate, Tidore, juga melakukan kontak dengan calon anggota KPI di Halmahera Selatan, Halmahera Utara. Untuk Ternate dan Tidore telah ada 7 BP dengan pengurus lengkap dan telah mengikuti PKD sehingga ada keinginan agar dapat didorong menjadi cabang. Untuk Halmahera Selatan dan Utara telah ada keinginan bergabung dan dalam persiapan untuk pembentukan balai perempuan serta PKD.

Monev program Oxfam dilakukan pada Juni, bertempat di Kupang. Pada kegiatan monev ini dihasilkan evaluasi terhadap individu dan organisasi serta adanya rencana tindak lanjut untuk program Oxfam selanjutnya.

III. 2. 2 DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI & SISTEM MANAGEMEN INFORMASI

1. Pengelolaan Website dan media sosial

Website Koalisi Perempuan Indonesia pada periode Januari – Juni 2014 dikunjungi oleh 13.641 dengan pengunjung per hari rata-rata 77 pengunjung. Ada penambahan sekitar 1000 kunjungan di banding pada periode akhir 2013. Posting berita sebanyak 18 ini mengalami penurunan dibandingkan periode akhir 2013 yang mencapai 6 berita per bulan. Fan page Koalisi Perempuan Indonesia di Facebook disukai oleh 975 orang mengalami kenaikan. FB yang dikelola Setnas sampai Juni 2014 mempunyai teman sebanyak 2.003. Twitter women coalition sampai Juni 2014 mempunyai follower sebanyak 826 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 6 bulan .

2. Produksi KIE

1. Pembuatan Factsheet seri demokrasi
2. Pembuatan contoh surat suara Pemilu Legislatif
3. Pembuatan Lembar informasi terkait PEMILU 2014
4. Foto – Foto dokumentasi yang di pameran dalam acara Deklarasi Agenda Politik dan Kaul Politik Perempuan
5. Pembuatan KIE untuk Swara Saraswati Award 2014 (trophy, wall of Fame, sertifikat , dll)
6. Pembuatan Brosur Profil Koalisi Perempuan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
7. Pencetakan AD ART dan Buku Saku
8. Pembuatan Kaos Perlindungan Sosial, Indonesia Beragam, Mewujudkan Keadilan dan demokrasi → sebagai alat kampanye
9. PIN Perlindungan Sosial
10. Buku 10 Agenda Politik yang diluncurkan pada bulan Maret 2014
11. Pencetakan modul manajemen kampanye dan strategi Politik

3. SEMAI

1. Semai edisi Post MDG menuju SDG's
2. Edisi tentang keterwakilan perempuan dalam PEMILU didukung IKAT US
3. SEMAI edisi Perempuan dan Perlindungan Sosial
4. SEMAI edisi Perempuan dan Akses Ekonomi
5. Penerbitan Buku Perempuan Memimpin

4. Support System

1. Membantu pengelolaan program kerjasama dengan OXFAM untuk area NTB dan NTT sebagai staf Pengorganisasian.
2. Pelaksana Media Award 2014
3. Pelaksanaan Seminar dan Workshop Penelitian

5. Publikasi dan Media

1. Dalam periode Januari – Juli 2014 Koalisi Perempuan Indonesia telah mengeluarkan sebanyak pernyataan sikap yang dikirimkan ke media massa dan diupdate di website yaitu :
 - Merespon PEMILU dengan mengirimkan surat terbuka kepada partai politik → Mei 2014
 - Perempuan dan Perlindungan Sosial
 - Pernyataan Sikap → April 2014
 - Sikap Politik Koalisi Perempuan terhadap PEMILU 2014
 - Pernyataan Sikap merespon Revisi UU MD3 yang meniadakan kuota keterwakilan perempuan .
2. Talkshow di radio / tv
 - a. Talkshow di KBR 68 membahas tentang keterwakilan perempuan dalam DCT dan penyelenggara PEMILU
 - b. Talkshow di Tempo TV dan AoRA TV Keterwakilan Perempuan dalam DCT
 - c. Talkshow di Radio KBR 68 H CALEG Perempuan Merespon isu HAM dan Gender
 - d. Talkshow di Tempo TV CALEG Perempuan Merespon isu HAM dan Gender
3. Berita di Media

Beberapa media memuat berita tentang aktifitas atau kegiatan yang dilakukan baik yang dilakukan oleh SEKJEND atau staf Sekretariat nasional . Ada 26 kliping media terkait kegiatan organisasi dengan isu antara lain keterwakilan perempuan , pembangunan berkelanjutan, AKI
4. Media Briefing dan Media Visit
 - a. Konferensi pers dilaksanakan di Bakoel Koffie Launching hasil pemetaan cepat keterwakilan perempuan dalam DCT
 - b. Konferensi pers dalam menyikapi hasil survey jurnalistik tentang AKI bersama INFID
 - c. Media briefing dilaksanakan di Bakoel Koffie Cikini menjelang malam anugerah Swara Saraswati pada tanggal 17 Juni 2014 dihadiri oleh 3 media yaitu Antara TV, Tabloid NOVA dan Harian KOMPAS.

Kliping media dapat dia akses melalui :

<http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/1431/Perempuan-masih-Terjerat-Kemiskinan/2014/06/19>

<http://m.tabloidnova.com/Nova/News/Varia-Warta/Koalisi-Perempuan-Indonesia-Apresiasi-Media-yang-Peduli-Kesetaraan-Jender>
 - d. Media visit dilaksanakan pada bulan Juli 2014 ke KOMPAS, Okezone.com, Suara Pembaruan dan Kantor Berita ANTARA untuk menyerahkan Swara Saraswati kepada pemenangnya karena mereka tidak hadir dalam malam anugerah pada tanggal 18 Juni 2014.

5. Anugerah Swara Sarasvati 2014

Anugerah Swara Sarasvati 2014 , dengan Thema " **Perempuan, Penghapusan Kemiskinan dan Perlindungan sosial dalam Media**"

Rangkaian kegiatan meliputi :

1. Pengumpulan dan penilaian media dan Jurnalis

Pengumpulan data tracking media dilakukan mulai tanggal 20 Mei 2014 dengan mengumpulkan berita dari media cetak, online , radio dan TV. Dilakukan oleh 2 orang yaitu Gabriella dan Deirdre Tenawin melalui kunjungan ke media dan juga online. Semua naskah terkumpul pada tanggal 4 Juni 2014 dan diberikan kepada tim juri pada tanggal 5 Juni 2014 .

2. Penentuan kriteria, seleksi dan penjurian

Rapat tim Juri dilakukan pada tanggal 5 Juni 2014 bertempat di secretariat Nasional dan dihadiri oleh 3 orang dewan juri yaitu Ignatius Haryanto, Iswati dan Dian Kartika Sari. Dua orang juri tidak bisa hadir yaitu Arswendo Atmowiloto dan Nezar Patria . Nezar Patria mengundurkan diri karena kesibukan kemudian digantikan oleh Heru Hendratmoko .

Kriteria penjurian disepakati yaitu :

1. Ide (orisinalitas) 20%
2. Cara Penulisan / Penyampaian (Sistematika, Isi, Bahasa, etika penulisan) 30%
3. Edukasi 20%
4. Kontrol Sosial (mengungkap kebocoran, kecurangan, mismanajemen, kritik) 30%

Dengan masa penjurian dilakukan sampai tanggal 16 Juni 2014. Naskah untuk 2 juri lain diantar langsung ke juri yang bersangkutan (Arswendo dan Heru Hendratmoko).

Rapat tim juri sesuai kesepakatan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2014 di Kantor SETNAS Koalisi Perempuan Indonesia dihadiri oleh 3 orang juri yaitu Ignatius Haryanto, Iswati dan Heru Hendratmoko. Arswendo tidak hadir namun sudah mengirimkan nominasi melalui email ke panitia . Dian Kartikasari tidak hadir karena sakit. Masing-masing juri menyampaikan 3 naskah yang menjadi unggulan .



Naskah berita dari tim juri :

1. Susah payah capai JKN
2. Yang tertinggal BPJS
3. Pasien Binggung , Layanan Gamang
4. Anggaran Negara Cukup untuk sejahteraan rakyat
5. Keluhan Mereka Tak pernah di dengar
6. Dana BANSOS langgengkan Kekuasaan

7. Sistem JKN rugikan Bidan
8. BAPPENAS tetap usulkan beras murah
9. Dana Bansos Naik Siginifikan Jelang 2014

Dari 9 naskah yang ada tim juri kemudian mempersempit dengan 4 nominasi yaitu :

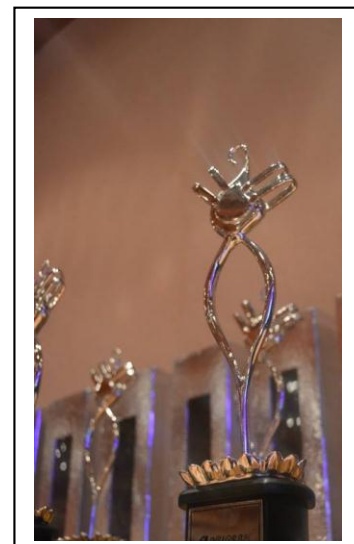
JUDUL BERITA	PENULIS	MEDIA
Yang tertinggal dari BPJS	Fitriani Zamzami	Republika/Antara
Keluhan Mereka Tidak Pernah di dengar	WHO	KOMPAS
Anggaran Negara Cukup untuk Sejahterakan rakyat	P-12	Suara Pembaruan
Susah payah Gapai JKN	Mukhamad Kurniawan	KOMPAS

Tim juri akhirnya memberikan penghargaan kepada :

JUDUL BERITA	PENULIS	MEDIA
Yang tertinggal dari BPJS	Fitriani Zamzami	Republika/Antara
Keluhan Mereka Tidak Pernah di dengar	WHO	KOMPAS
Anggaran Negara Cukup untuk Sejahterakan rakyat	P-12	Suara Pembaruan

3. Malam Anugerah Swara Sarasvati 2014

Pemberian penghargaan Swara Sarasvati Award 2014 dilaksanakan di Auditorium Museum Nasional pada tanggal 18 Juni 2014 , Jam 20.00 WIB dihadiri oleh undangan yang terdiri dari jaringan masyarakat sipil dan media (48 orang) . Malam anugerah swara Sarasvati dibuka dengan tarian Gulipang dari Jawa Timur . Nanfeng Nusantara mengisi dengan lagu dan musikalisasi puisi karya Wiji Thukul . Sambutan dari Koalisi Perempuan Indonesia disampaikan oleh Ibu Luki Paramita (Presidium Nasional) yang menyampaikan bahwa swara sarasvati adalah bentuk apresiasi Koalisi Perempuan terhadap media dan jurnalis yang berperan dalam mewacanakan tentang perempuan, penghapusan kemiskinan dan perlindungan sosial. Apresiasi ini telah diberikan untuk



ketiga kalinya dengan tema berbeda dimasing-masing tahun yaitu 2010 dengan tema kepemimpinan dan keterwakilan perempuan, 2012 dengan tema Angka Kematian Ibu dan Anak.

Pembacaan nominasi oleh Ketua Dewan Juri Bapak Ignatius Haryanto yang menyampaikan proses penjurian dan sampai tahap pemberian anugerah.

Malam Anugerah dihadiri oleh 2 penerima anugerah yaitu Harian Jurnal Nasional dalam kategori Media Cetak dan RRI (Radio Republik Indonesia) kategori media radio yang masing-masing diwakili oleh pihak manajemen . Sementara penerima anugerah yang lain akan diserahkan ke media secara langsung oleh panitia .

Kliping pemberitaan media dapat diakses di :

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anugerah-swara-sarasvati-2014>

http://www.museumnasional.or.id/news/penganugerahan_swara_sarasvati_2014.html

<http://rri.co.id/post/berita/85802/ruang publik/rri raih anugrah swara sarasvati 2014.html>

<http://www.jurnas.com/news/138541/Jurnal-Nasional-Raih-Penghargaan-Swara-Sarasvati-2014-2014/1/Sosial-Budaya/Perempuan>

6. SMS Gateway

Pengelolaan media ini sangat kurang , karena alasan teknis dan juga kesibukan staf yang menangani. Membutuhkan person khusus untuk pengelolaan sms gateway.

7. Distribusi Alat-alat Kampanye

Distribusi alat-alat kampanye (factsheet, brosur, poster, buku, dll) dan alat-alat organisasi (bendera, cd mars, kartu iuran anggota, buku saku dan buku AD ART) bekerjasama dengan divisi Kerumahtanggaan.

Distribusi informasi melalui jaringan email atau millis anggota, website, Fan Page Facebook, twitter.

8. Peningkatan Kapasitas

- a) Strategi advokasi masyarakat sipil menggunakan media sosial diselenggarakan oleh ICT Watch

- b) Google day → penggunaan google untuk mempermudah komunikasi

9. Update Data base anggota & Kartu Anggota

- a. Pembuatan database anggota dan update software database
- b. Update data anggota walaupun ini sudah menjadi kesepakatan di Rapat Kerja Nasional namun sangat sulit dilakukan. Beberapa wilayah yang sudah melakukan update data base walaupun masih ada kurang yaitu Sumbar, Jabar, Jambi, Kukar, Sulsel, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat , Sikka) Maluku Utara, Bali dan Tangerang .
- c. Input data NTB, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sikka, Maluku Utara, Bali, Minahasa Utara, Minahasa Selatan
- d. Jumlah pendaftar online melalui website sebanyak 20 orang.
- e. Rekap jumlah data anggota

Pembuatan Kartu Anggota

- a. Periode Januari – Juni 2014 telah di cetak kartu Anggota untuk NTT (Sumba)

10. Tehnical support

- a. Update software anti virus
- b. Pindahan data dan update server untuk peningkatan kapasitas simpanan data
- c. Pembelian dan penginstalan 12 komputer 9 laptop untuk area Program MAMPU
- d. Pembelian dan penginstalan 9 komputer dan 3 laptop untuk setnas
- e. Pembelian 1 Unit Komputer Server serta penginstalan menggunakan OS Linux, 1 unit Projector portable, 1 unit printer portable, 6 harddisk external, kursi dan meja kerja @ 4 unit
- f. Pembelian 2 unit komputer untuk Sumba
- g. Pembelian 1 unit Komputer untuk Kupang
- h. Instalasi jaringan LAN

11. Maintance

Maintance dilakukan berkala , di masing-masing komputer staf sudah terdapat aplikasi auto scan dengan jadwal seminggu sekali .